



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 50);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 51);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.

2. Pemerintah Daerah...

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada rencana jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
7. Rencana Strategis Dinas Pendidikan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
11. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan rencana strategis Perangkat Daerah.
12. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran rencana strategis Perangkat Daerah.
13. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasonalisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan rencana pembangunan jangka menengah Daerah serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran rencana strategis Perangkat Daerah.
14. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realitas/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
15. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang perlu diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.

16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.
18. Kinerja adalah capaian hasil kerja.
19. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang membawa akibat yang tidak diinginkan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
20. Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Sistematika Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pendidikan;
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
 - d. BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai uraian sistematika Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV...

BAB IV MANAJEMEN RISIKO

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan menerapkan Manajemen Risiko dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Rencana Strategis Dinas Pendidikan.
- (2) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menjamin pencapaian Tujuan, Sasaran, dan indikator Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Program dan Kegiatan;
 - c. meminimalkan potensi terjadinya penyimpangan, kegagalan, dan kerugian; dan
 - d. memperkuat akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
- (3) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pengendalian intern pemerintah.
- (4) Tahapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan konteks;
 - b. identifikasi Risiko;
 - c. analisis Risiko;
 - d. evaluasi Risiko; dan
 - e. pengendalian Risiko.
- (5) Hasil Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar dalam:
 - a. penyusunan kebijakan dan strategi Perangkat Daerah;
 - b. perumusan Program dan Kegiatan;
 - c. penetapan target Kinerja; dan
 - d. pengambilan keputusan manajerial.
- (6) Kepala Dinas Pendidikan bertanggung jawab atas penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Pendidikan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025 NOMOR 36

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 33 TAHUN TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

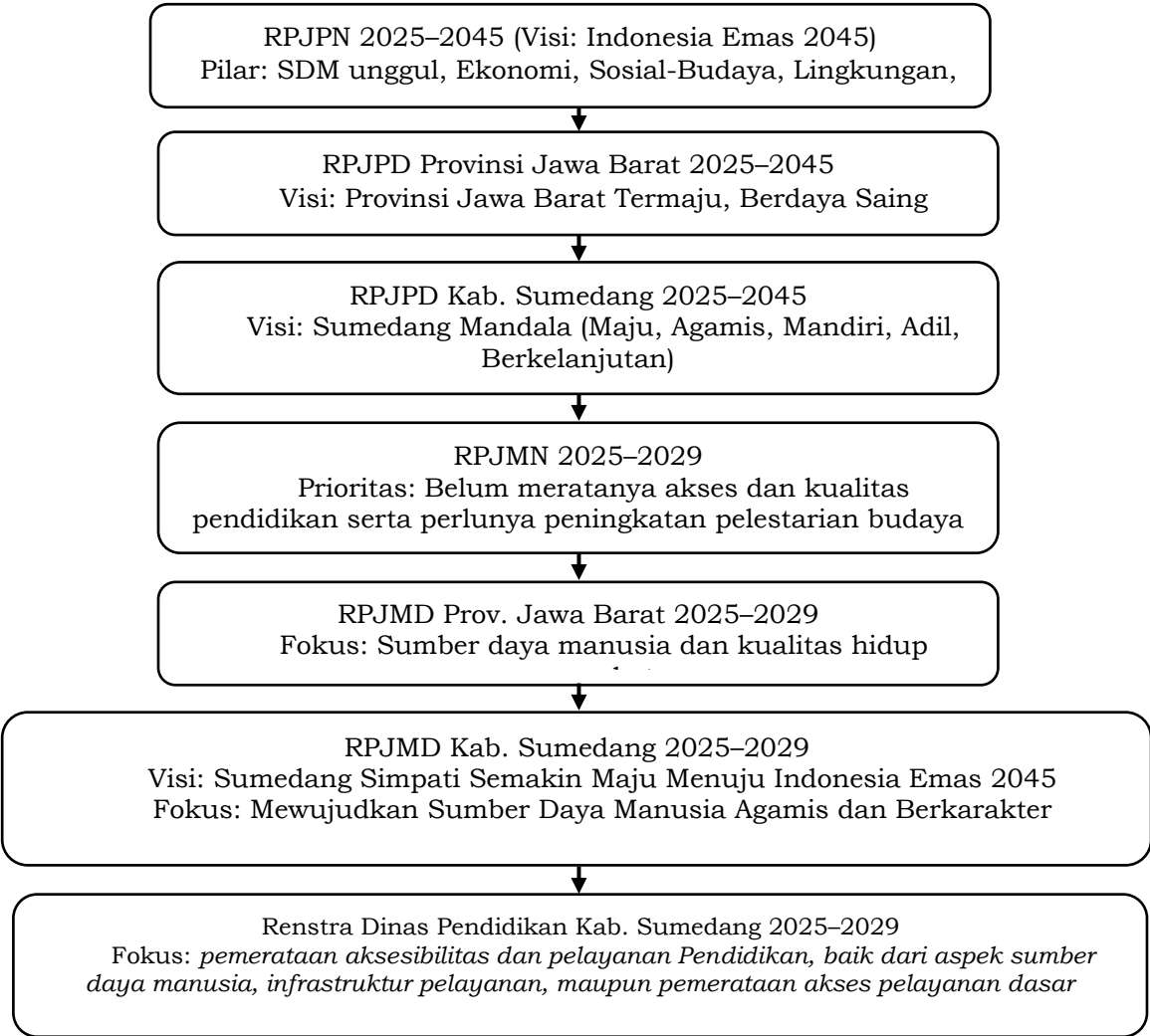
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 merupakan langkah strategis dalam mendukung pencapaian visi pembangunan daerah serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Renstra ini disusun mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang memberikan arahan normatif bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan jangka menengah yang selaras dan terintegrasi.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029. RPJMD memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang menjadi arah kebijakan pembangunan lima tahunan, sedangkan Renstra Dinas Pendidikan merinci kontribusi sektor pendidikan dalam mewujudkan sasaran tersebut. Seluruh program, kegiatan, dan indikator kinerja dalam Renstra diselaraskan dengan RPJMD agar tercipta konsistensi arah pembangunan, integrasi perencanaan dan penganggaran, serta keterukuran hasil yang dicapai.

Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui layanan pendidikan yang merata, bermutu, dan berkeadilan. Tantangan globalisasi, perkembangan teknologi, perubahan kurikulum, serta tuntutan peningkatan kompetensi peserta didik dan tenaga pendidik menuntut adanya perencanaan yang responsif, adaptif, dan berorientasi hasil.

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang 2025-2029 ini disusun dengan pendekatan partisipatif, transparan, dan akuntabel, serta berlandaskan pada data dan informasi yang valid. Dokumen ini akan menjadi pedoman utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan setiap tahunnya, sekaligus sebagai dasar dalam pelaksanaan evaluasi kinerja serta pengendalian pembangunan di bidang Pendidikan.

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk mengoperasionalkan rencana pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan manajemen sumber daya dalam periode 5 tahun juga merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan prioritas Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Dokumen ini disusun untuk menjamin keselarasan antara kebijakan daerah dan pelaksanaan teknis pemerintahan serta pelayanan publik. Adapun keterkaitannya dapat dilihat pada bagan berikut:



Sebagai unit organisasi pemerintahan terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan *riil* masyarakat. Dalam konteks ini, Renstra berperan sebagai instrumen penting yang menjabarkan arah pembangunan kabupaten secara lebih operasional dan kontekstual sesuai karakteristik dan tantangan lokal Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

Dengan demikian, penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029 merupakan langkah strategis untuk memastikan arah pembangunan pendidikan daerah berjalan selaras dengan kebijakan nasional, provinsi, dan prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang. Dokumen ini tidak hanya menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga instrumen pengendali dan evaluasi kinerja dalam rangka mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19);
15. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10).
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 11).
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 2025).
33. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 173 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 173).
34. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 3).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan strategis 5 tahunan yang memberikan arahan dan dasar pengambilan keputusan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang tahun 2025-2029 yaitu Sumedang Simpati Semakin Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Menjabarkan visi, misi dan program prioritas RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029;
2. Merumuskan ukuran keberhasilan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang berupa indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai dasar evaluasi yang dilaksanakan setiap tahunnya;
3. Merumuskan kerangka pendanaan indikatif Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk 5 (lima) tahun ke depan.
4. Mengarahkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan informasi berikut:

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang

Bab ini menguraikan informasi berikut:

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

	2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
Bab III	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
	Bab ini menguraikan informasi berikut:
	3.1 Tujuan
	3.2 Sasaran
	3.3 Strategi
	3.4 Arah Kebijakan
Bab IV	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
	Bab ini menguraikan informasi berikut:
	4.1 Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah
	4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
	4.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
	4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Bab V	Penutup
	Bab ini menguraikan informasi tentang kesimpulan penting substansi, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Dinas Pendidikan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, Kepala Dinas melaksanakan sebagian kewenangan bupati/wali kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang pendidikan. Dengan kedudukannya tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang mempunyai peran sangat strategis di Kabupaten Sumedang, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya.

Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang sebagai salah satu Dinas Pendidikan di wilayah Kabupaten Sumedang memiliki fungsi strategis dalam mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, sekaligus sebagai perpanjangan tangan pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan urusan pendidikan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang melayani 1846 sekolah mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP hingga Pendidikan Kemasyarakatan yang tersebar di 26 Kecamatan di Kabupaten Sumedang.

Dalam aspek pelayanan publik, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang telah menyelenggarakan berbagai layanan administratif seperti pelayanan perizinan, legalitas dokumen, layanan pengaduan, surat menyurat, dan informasi publik.

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang

Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Sumedang memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang pendidikan, pembangunan sumber daya manusia, dan pelayanan publik. Orientasi utama kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang adalah memberikan pelayanan yang prima, cepat, dan responsif kepada

masyarakat, sekaligus memastikan bahwa seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dapat terlaksana secara efektif dan akuntabel. Posisi Dinas Pendidikan sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah menuntut adanya sinergi yang kuat antara aparatur, sarana prasarana, serta tata kelola layanan yang sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan inovasi.

Pelayanan publik di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang dilaksanakan melalui beragam program yang saling terintegrasi. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik menjadi tulang punggung dalam memberikan layanan administrasi pemerintahan dalam bidang pendidikan, rekomendasi perizinan tertentu, serta fasilitasi berbagai urusan kependidikan. Program ini berfokus pada kemudahan akses, kepastian prosedur, dan kecepatan proses layanan, yang didukung oleh optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kompetensi aparatur.

Selain itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang juga menjalankan Program Sekolah Ramah Lingkungan, yang bertujuan membentuk karakter peduli lingkungan dan budaya hidup sehat di lingkungan sekolah melalui program *zero waste school* dan toilet sehat.

Dari sisi keamanan dan ketertiban wilayah, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum menjadi upaya penting dalam menjaga stabilitas sosial dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang bekerja sama dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Dinas Pendidikan (Forkopimcam), aparat keamanan, tokoh masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan untuk mengantisipasi potensi gangguan ketertiban, menyelesaikan permasalahan sosial secara preventif, dan merespons cepat setiap insiden yang terjadi di lapangan.

Selanjutnya, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum mengakomodasi tugas-tugas umum pemerintahan yang bersifat lintas sektor, termasuk koordinasi lintas perangkat daerah, pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, serta pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah. Program ini juga berperan dalam mendukung pelaksanaan upacara kenegaraan, dan kegiatan seremonial di bidang Pendidikan.

Terakhir, Program Pembinaan dan Pengawasan Sekolah menjadi instrumen pengendalian dan penjamin mutu tata kelola Sekolah. Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang secara rutin melakukan monitoring, evaluasi, dan asistensi terhadap kinerja Sekolah, termasuk pengelolaan keuangan Sekolah, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Sekolah. Dengan pembinaan yang terencana dan berkesinambungan, diharapkan Sekolah-sekolah yang berada di dalam naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang dapat menjadi lebih mandiri, tertib administrasi, dan mampu meningkatkan kualitas Pendidikan di Kabupaten Sumedang.

Secara keseluruhan, gambaran pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang mencerminkan peran yang komprehensif dan multidimensional, di mana pelayanan publik tidak hanya berfokus pada administrasi, tetapi juga pemberdayaan, keamanan, tata kelola pemerintahan, dan pembinaan masyarakat. Integrasi seluruh program tersebut menjadi landasan penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang optimal, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang merupakan salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang mempunyai peran strategis dalam urusan pendidikan.

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang

Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang dituangkan dalam susunan organisasi yang mampu menjamin terlaksananya tugas dan fungsi secara efektif dan efisien. Susunan organisasi beserta uraian tata kerja yang komprehensif menggambarkan wewenang dan tanggungjawab setiap unsur organisasi, rentang kendali dan interaksi antara pimpinan dan bawahan, serta mekanisme koordinasi internal organisasi guna menjamin kesepahaman, kesatuan arah dan keterpaduan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang membentuk Struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas Pendidikan Membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan
3. Bidang PAUD dan DIKMAS Membawahi:
 - a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan PAUD dan DIKMAS
 - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS
4. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Membawahi:
 - a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SD
 - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD
5. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Membawahi:
 - a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP
 - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP
6. Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Membawahi:
 - a. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana SD; dan
 - b. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana SMP, PAUD dan DIKMAS;

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 173 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan, Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pendidikan mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan tugas pembantuan di bidang Pendidikan. Untuk melaksanakan tugas pokok, uraian tugas Kepala Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut :

- a) merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja Dinas Pendidikan;
- b) menetapkan dan mengevaluasi kebijakan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur layanan di bidang pendidikan;
- c) menyelenggarakan dan mengendalikan kebijakan penyusunan program dan kegiatan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, keuangan, pengelolaan barang milik daerah, dan kepegawaian pada Dinas Pendidikan;
- d) menyelenggarakan kebijakan pengelolaan data dan

informasi di bidang PAUD, SD, SMP, dan DIKMAS;

- e) merumuskan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebijakan program pengelolaan PAUD, SD, SMP, dan DIKMAS;
- f) merumuskan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebijakan pengembangan sarana dan prasarana PAUD, SD, SMP, dan DIKMAS;
- g) menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan dengan instansi atau pihak terkait;
- h) menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan kurikulum muatan lokal PAUD, SD, SMP, dan DIKMAS;
- i) menyelenggarakan dan mengendalikan kebijakan program pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan PAUD, SD, SMP, dan DIKMAS;
- j) menyelenggarakan dan mengevaluasi kebijakan kerja sama di bidang PAUD, SD, SMP, dan DIKMAS;
- k) menyelenggarakan penetapan penerbitan izin PAUD, SD, SMP, dan DIKMAS yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- l) menyelenggarakan dan mengendalikan kebijakan pembinaan, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra yang penuturannya dalam Daerah Kabupaten;
- m) menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesekretariatan, Bidang PAUD dan DIKMAS, Bidang Pendidikan SD, Bidang Pendidikan SMP, serta Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana secara berkala;
- n) melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan; dan
- o) melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

2. Sekretaris Dinas Pendidikan

Sekretaris mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Pendidikan dalam melaksanakan kegiatan di bidang program dan rencana kerja, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan,

pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian, dan pelaporan pada Dinas Pendidikan. Untuk melaksanakan Tugas Pokok, Uraian Tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:

- a) merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis penyusunan bahan perencanaan, anggaran dan pelaporan kinerja Dinas Pendidikan;
- b) menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dan kegiatan di lingkup Sekretariat Dinas Pendidikan;
- c) menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelayanan Dinas Pendidikan dan pada lingkup Sekretariat Dinas Pendidikan;
- d) mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja pada Dinas Pendidikan;
- e) menyelenggarakan fasilitasi koordinasi dan kerjasama di bidang PAUD, pendidikan dasar, dan DIKMAS;
- f) menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi di bidang PAUD, pendidikan dasar, dan DIKMAS;
- g) merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan ketatausahaan, administrasi persuratan dan Kearsipan;
- h) merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kerumahtanggaan, kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja pada Dinas Pendidikan;
- i) menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan bahan publikasi, kehumasan dan keprotokolan pada Dinas Pendidikan;
- j) merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan administrasi keuangan dan perbendaharaan Dinas Pendidikan;
- k) merumuskan dan menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkup Dinas Pendidikan;
- l) merumuskan dan menyelenggarakan penyusunan rencana umum dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Dinas Pendidikan;

- m) merumuskan dan menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkup Dinas Pendidikan;
- n) menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat Dinas Pendidikan; dan
- o) melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya

3. Sub Bagian Umum dan Keuangan

Subbagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Subbagian Umum dan Keuangan. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai Tugas Pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, pengelolaan aset dan sarana kerja Dinas Pendidikan. Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Uraian Tugas Kepala Subbagian Umum dan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a) melaksanakan melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di lingkup Subbagian Umum dan Keuangan;
- b) melaksanakan penyusunan dan menyiapkan bahan evaluasi standar operasional prosedur pelayanan pada Subbagian Umum dan Keuangan;
- c) melaksanakan teknis pengelolaan data dan informasi di bidang PAUD, pendidikan dasar, dan DIKMAS;
- d) melaksanakan kegiatan teknis ketatausahaan dan Kearsipan di lingkup Dinas Pendidikan;
- e) melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis penyusunan bahan publikasi, kehumasan, dan keprotokolan Dinas Pendidikan;
- f) melaksanakan teknis kegiatan kerumahtanggaan di lingkup Dinas Pendidikan;
- g) melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan barang milik daerah serta pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas Pendidikan;
- h) menyusun rencana umum dan melaksanakan teknis

- pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas Pendidikan;
- i) menyusun kebutuhan dan melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;
 - j) melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan dan pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkup Dinas Pendidikan;
 - k) melaksanakan kegiatan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan Dinas Pendidikan;
 - l) melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan dengan unit kerja lainnya yang terkait;
 - m) menyusun bahan laporan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas Pendidikan;
 - n) menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Keuangan; dan
 - o) melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

4. Bidang PAUD dan DIKMAS

Bidang PAUD dan DIKMAS dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS. Kepala PAUD dan DIKMAS mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Pendidikan dalam melaksanakan kegiatan bidang PAUD dan DIKMAS. Untuk melaksanakan Tugas Pokok, Uraian Tugas Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS adalah sebagai berikut:

- a) menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan kinerja dilingkup Bidang PAUD dan DIKMAS;
- b) menyelenggarakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelayanan Bidang PAUD dan DIKMAS;
- c) menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, Peserta Didik dan pembangunan karakter, serta pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS;
- d) menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, serta Peserta Didik dan

pembangunan karakter, serta pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS;

- e) menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal PAUD dan DIKMAS;
- f) menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, Peserta Didik dan pembangunan karakter, serta pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS;
- g) menyelenggarakan penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS;
- h) menyelenggarakan penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS dalam Daerah Kabupaten;
- i) melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang Kurikulum dan penilaian, Peserta Didik dan pembangunan karakter, serta pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS;
- j) melaksanakan pelaporan di bidang Kurikulum dan penilaian, Peserta Didik dan pembangunan karakter, serta pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS; dan
- k) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan PAUD dan DIKMAS

Seksi Kurikulum dan Kesiswaan PAUD dan DIKMAS dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan PAUD dan DIKMAS. Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan PAUD dan DIKMAS mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS dalam melaksanakan kegiatan bidang Kurikulum dan Kesiswaan PAUD dan DIKMAS. Untuk melaksanakan Tugas Pokok, Uraian Tugas Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan PAUD dan DIKMAS adalah sebagai berikut:

- a) melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di lingkup Seksi Kurikulum dan Kesiswaan PAUD dan DIKMAS;
- b) melaksanakan penyusunan dan menyiapkan bahan evaluasi

standar operasional prosedur pelayanan Seksi Kurikulum dan Kesiswaan PAUD dan DIKMAS;

- c) melaksanakan penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Kurikulum dan penilaian, serta pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter Peserta Didik PAUD dan DIKMAS;
- d) melaksanakan penyiapan bahan penetapan Kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian PAUD dan DIKMAS;
- e) melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan Kurikulum dan penilaian, PAUD dan DIKMAS;
- f) melaksanakan penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter Peserta Didik PAUD dan DIKMAS;
- g) melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter Peserta Didik PAUD dan DIKMAS;
- h) melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kurikulum dan penilaian PAUD dan DIKMAS;
- i) menyusun bahan pelaporan di bidang Kurikulum dan penilaian serta bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter Peserta Didik PAUD dan DIKMAS; dan
- j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS dalam melaksanakan kegiatan bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS. Untuk melaksanakan Tugas Pokok, Uraian Tugas Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS adalah

sebagai berikut:

- a) melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di lingkup Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS;
- b) melaksanakan penyusunan dan menyiapkan bahan evaluasi standar operasional prosedur pelayanan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS;
- c) melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS;
- d) melaksanakan penyiapan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS;
- e) melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS;
- f) melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS;
- g) menyusun bahan pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS; dan
- h) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

7. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar

Bidang Pendidikan SD dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Bidang Pendidikan SD. Kepala Bidang Pendidikan SD mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Pendidikan dalam melaksanakan kegiatan Bidang Pendidikan SD. Untuk melaksanakan Tugas Pokok, Uraian Tugas Kepala Bidang Pendidikan SD adalah sebagai berikut:

- a) melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Pendidikan SD;
- b) melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Bidang Pendidikan SD;
- c) menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan dan

koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kurikulum dan penilaian, Peserta Didik dan pembangunan karakter, serta pendidik dan Tenaga Kependidikan SD;

- d) menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang Kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, Peserta Didik dan pembangunan karakter, serta pendidik dan Tenaga Kependidikan SD;
- e) menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan Kurikulum muatan lokal SD;
- f) menyelenggarakan penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan SD;
- g) menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan Kurikulum dan penilaian, Peserta Didik dan pembangunan karakter, serta pendidik dan Tenaga Kependidikan SD;
- h) menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturannya dalam Daerah Kabupaten;
- i) melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang Kurikulum dan penilaian, Peserta Didik dan pembangunan karakter, serta pendidik dan Tenaga Kependidikan SD;
- j) melaksanakan pelaporan di bidang Kurikulum dan penilaian, Peserta Didik dan pembangunan karakter, serta pendidik dan Tenaga Kependidikan SD; dan
- k) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

8. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SD

Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SD dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SD. Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SD mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Bidang Pendidikan SD dalam melaksanakan kegiatan bidang Kurikulum dan Kesiswaan SD. Untuk melaksanakan Tugas Pokok, Uraian Tugas Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SD adalah sebagai berikut:

- a) melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja dilingkup Seksi Kurikulum dan Kesiswaan

SD;

- b) melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja dilingkup Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SD;
- c) melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan Kurikulum dan penilaian, serta pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter Peserta Didik pendidikan SD;
- d) melaksanakan penyiapan bahan penetapan Kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian SD;
- e) melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan Kurikulum dan penilaian SD;
- f) melaksanakan penyiapan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturannya dalam Daerah Kabupaten;
- g) melaksanakan penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter Peserta Didik SD;
- h) melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter Peserta Didik SD;
- i) menyusun bahan pelaporan di bidang Kurikulum dan penilaian serta bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter Peserta Didik SD; dan
- j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

9. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Bidang Pendidikan SD dalam melaksanakan kegiatan bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD. Untuk melaksanakan Tugas Pokok, Uraian Tugas Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD adalah sebagai berikut:

- a) melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja dilingkup Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD;

- b) melaksanakan penyusunan dan menyiapkan bahan evaluasi standar operasional prosedur pelayanan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD;
- c) melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan Tenaga Kependidikan SD;
- d) melaksanakan penyiapan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan Tenaga Kependidikan SD;
- e) melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pendidik dan Tenaga Kependidikan SD;
- f) melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan Tenaga Kependidikan SD;
- g) menyusun bahan pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan Tenaga Kependidikan SD; dan
- h) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

10. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD

Bidang Pendidikan SMP dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Bidang Pendidikan SMP. Kepala Bidang Pendidikan SMP mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Pendidikan dalam melaksanakan kegiatan di bidang Pendidikan SMP. Untuk melaksanakan Tugas Pokok, Uraian Tugas Kepala Bidang Pendidikan SMP adalah sebagai berikut:

- a) melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Pendidikan SMP;
- b) melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelayanan Bidang Pendidikan SMP;
- c) menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kurikulum dan penilaian, Peserta Didik dan pembangunan karakter, serta pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP;
- d) menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang Kurikulum dan penilaian, Peserta Didik dan pembangunan karakter, serta pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP;
- e) menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan Kurikulum muatan lokal SMP;
- f) menyelenggarakan penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan SMP;
- g) menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan

- Kurikulum dan penilaian, Peserta Didik dan pembangunan karakter, serta pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP;
- h) menyelenggarakan penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP;
 - i) menyelenggarakan penyusunan bahan rekomendasi pemindahan tenaga pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP dalam daerah Kabupaten;
 - j) melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang Kurikulum dan penilaian, Peserta Didik dan pembangunan karakter, serta tenaga pendidik dan kependidikan SMP;
 - k) melaksanakan pelaporan di bidang Kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, Peserta Didik dan pembangunan karakter, serta tenaga pendidik dan kependidikan SMP; dan
 - l) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

11. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP

Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP. Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Bidang Pendidikan SMP dalam melaksanakan kegiatan di bidang Kurikulum dan Kesiswaan SMP. Untuk melaksanakan Tugas Pokok, Uraian Tugas Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP adalah sebagai berikut:

- a) melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja dilingkup Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP;
- b) melaksanakan penyusunan dan menyiapkan bahan evaluasi standar operasional prosedur pelayanan Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP;
- c) melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan Kurikulum dan penilaian, serta pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter Peserta Didik SMP;
- d) melaksanakan penyiapan bahan penetapan Kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian SMP;
- e) melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan Kurikulum dan penilaian SMP;
- f) melaksanakan penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter Peserta Didik SMP;
- g) melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter Peserta Didik SMP;

- h) menyusun bahan pelaporan di bidang Kurikulum dan penilaian serta bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter Peserta Didik SMP; dan
- i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

12. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Bidang Pendidikan SMP dalam melaksanakan kegiatan di bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP. Untuk melaksanakan Tugas Pokok, Uraian Tugas Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP adalah sebagai berikut:

- a) melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja dilingkup Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP;
- b) melaksanakan penyusunan dan menyiapkan bahan evaluasi Standar Operasional Prosedur pelayanan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP;
- c) melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP;
- d) melaksanakan penyiapan bahan rencana kebutuhan dan rekomendasi pemindahan pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP dalam Daerah Kabupaten;
- e) melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP;
- f) melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP;
- g) menyusun bahan pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP; dan
- h) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

13. Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana

Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana. Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Pendidikan dalam melaksanakan kegiatan Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok, Uraian Tugas Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana adalah sebagai berikut:

- a) melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana;
- b) melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelayanan Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana;
- c) menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sarana dan prasarana PAUD, SD, SMP, dan DIKMAS;
- d) menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sarana dan prasarana PAUD, SD, SMP, dan DIKMAS;
- e) menyelenggarakan penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Satuan PAUD, SD, SMP, dan DIKMAS;
- f) melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan sarana dan prasarana PAUD, SD, SMP, dan DIKMAS;
- g) melaksanakan pelaporan di bidang pengembangan sarana dan prasarana PAUD, SD, SMP, dan DIKMAS;
- h) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

14. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana SD

Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana SD dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana SD. Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana SD mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan kegiatan bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana SD. Untuk melaksanakan Tugas Pokok, Uraian Tugas Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana SD adalah sebagai berikut:

- a) melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di lingkup Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana SD;
- b) melaksanakan penyusunan dan menyiapkan bahan evaluasi standar operasional prosedur pelayanan Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana SD;
- c) melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sarana dan prasarana SD;

- d) melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pengembangan sarana prasarana SD;
- e) melaksanakan penyiapan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan SD;
- f) melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pengembangan sarana dan prasarana pendidikan SD;
- g) menyusun bahan pelaporan di bidang pengembangan sarana dan prasarana SD; dan
- h) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

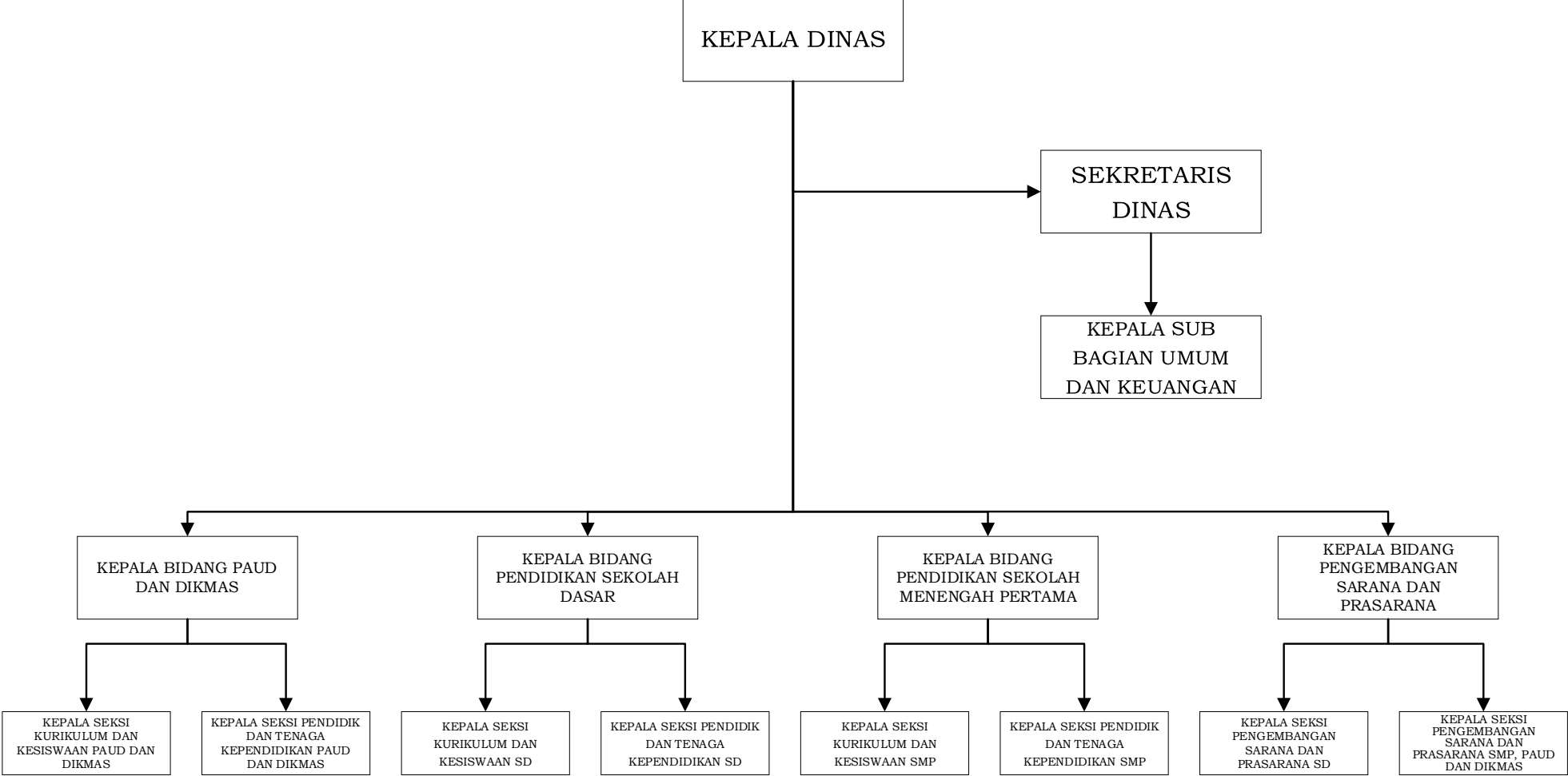
15. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana SMP, PAUD dan DIKMAS

Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana SMP, PAUD dan DIKMAS dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana SMP, PAUD dan DIKMAS. Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana SMP, PAUD dan DIKMAS mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan kegiatan bidang pengembangan sarana dan prasarana SMP, PAUD, dan DIKMAS. Untuk melaksanakan Tugas Pokok, Uraian Tugas Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana SMP, PAUD dan DIKMAS adalah sebagai berikut:

- a) melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja dilingkup Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana SD;
- b) melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja dilingkup Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana SMP, PAUD dan DIKMAS;
- c) melaksanakan penyusunan dan menyiapkan bahan evaluasi standar operasional prosedur pelayanan Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana SMP, PAUD dan DIKMAS;
- d) melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sarana dan prasarana SMP, PAUD, dan DIKMAS;
- e) melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pengembangan sarana dan prasarana SMP, PAUD, dan DIKMAS;
- f) melaksanakan penyiapan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan SMP, PAUD, dan DIKMAS;
- g) melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pengembangan sarana dan prasarana pendidikan SMP, PAUD, dan DIKMAS;

- h) menyusun bahan pelaporan di bidang pengembangan sarana dan prasarana SMP, PAUD, dan DIKMAS; dan
- i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Gambar 2. 1
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang



B. Sumber Daya Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang

B.1 Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sangat ditentukan oleh ketersediaan dan kapasitas sumber daya yang dimiliki. Sumber daya perangkat daerah yang dimaksud mencakup sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta anggaran yang tersedia untuk mendukung operasional dan pelaksanaan program kegiatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

Kondisi sumber daya aparatur pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

1. Jumlah pegawai menurut kelompok umur

Berdasarkan tabel 2.1.1 di bawah, jumlah pegawai menurut kelompok umur sebagai berikut :

Tabel 2.1.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur						
No .	Kelompok Umur	Jenis ASN			Jumlah Pegawai	Persentase
		PNS	PPPK	CPNS		
1.	< 25 Tahun	-	2	-	2	0,03%
2.	25 - 34 Tahun	219	951	3	1.173	18,79%
3.	35 - 44 Tahun	646	1.020	-	1.666	26,68%
4.	45 - 54 Tahun	856	494	-	1.350	21,62%
5.	≥ 55 Tahun	1.798	255	-	2.053	32,88%

Sumber : Sub Bagian Umum dan Keuangan, Agustus 2025

Tabel 2.1.1 menyajikan distribusi jumlah pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang berdasarkan kelompok umur. Data ini penting untuk melihat struktur usia sumber daya aparatur yang dimiliki Dinas Pendidikan serta untuk merumuskan strategi pengembangan aparatur ke depan.

Berdasarkan data:

- a. Terdapat pegawai berusia di bawah 25 tahun sebanyak 2 orang PPPK (0,03%), adapun untuk kelompok usia 25–34 tahun berjumlah 1173 orang (18,79%) yang terdiri dari PNS sebanyak 219 orang, PPPK sebanyak 951 orang dan CPNS sebanyak 3

orang. Artinya, meskipun hanya 18,79% tetapi Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang memiliki tenaga pegawai muda, yang dalam konteks manajemen sumber daya manusia menunjukkan adanya proses regenerasi yang aktif.

- b. Pegawai kelompok usia 35–44 tahun berjumlah 1666 orang (26,68%) terdiri dari PNS sebanyak 646 orang dan PPPK sebanyak 1020 orang, yang berarti bahwa struktur usia pegawai didominasi juga oleh pegawai berusia senior.
- c. Pegawai kelompok usia 45-54 tahun berjumlah 1350 orang (21,62%) terdiri dari PNS sebanyak 856 orang dan PPPK sebanyak 494 orang. Adapun pegawai kelompok usia diatas 55 tahun berjumlah 2053 orang (32,88%) terdiri dari PNS sebanyak 1798 orang dan PPPK sebanyak 255 orang. Dengan demikian 81,18% pegawai berada pada usia di atas 35 tahun, yang didominasi kategori usia menjelang pensiun atau menjelang akhir masa kerja aktif sebanyak 2053 orang (32,88%). Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pegawai Dinas Pendidikan memiliki masa kerja yang relatif terbatas ke depan.

Implikasi Strategis:

- a. Regenerasi SDM: pegawai muda menjadi tantangan besar dalam kesinambungan pelayanan publik. Perlu dirancang strategi pengkaderan aparatur baru yang memiliki kompetensi digital dan inovatif.
- b. Peningkatan produktivitas dan transfer pengetahuan: Pegawai senior dapat menjadi mentor untuk proses transfer pengetahuan dan pengalaman kerja, namun perlu juga mendapat dukungan dari sisi kesehatan, pelatihan teknologi, dan manajemen beban kerja.
- c. Perencanaan suksesi dan reformasi SDM: Ketersediaan data ini menjadi dasar dalam menyusun rencana kebutuhan ASN (Analisis Jabatan dan Beban Kerja), serta menjadi pertimbangan dalam rencana reformasi birokrasi berbasis peningkatan kinerja dan profesionalisme aparatur.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa struktur usia pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang pada tahun 2025 menunjukkan dominasi kelompok usia senior dan usia tua. Hal

ini menjadi sinyal penting untuk segera dilakukan revitalisasi dan regenerasi sumber daya manusia guna menjamin keberlanjutan pelayanan publik yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing di masa depan.

2. Jumlah pegawai menurut golongan

Berdasarkan tabel 2.1.2 di bawah, jumlah pegawai menurut golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.2
Jumlah Pegawai menurut Golongan

No . 1.	Golongan	Jenis ASN			Jumlah Pegawai	Persentase
		PNS	PPPK	CPNS		
1.	I (IA-ID)	1	1	-	2	0,03%
2.	II (IIA-IIID)	96	1	-	97	1,55%
3.	III (IIIA-IIID)	1.502	2.720	3	4.225	67,66%
4.	IV (IVA-IVE)	1.920	-	-	1.920	30,75%

Sumber : Sub Bagian Umum dan Keuangan, Agustus 2025

Tabel 2.1.2 menggambarkan distribusi pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang berdasarkan golongan kepangkatan, yang mencerminkan jenjang karier, pengalaman kerja, dan tingkat kewenangan masing-masing aparatur sipil negara (ASN).

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan mayoritas pegawai berada pada Golongan III (67,66%) yang terdiri dari PNS sebanyak 1502 orang, PPPK sebanyak 2720 orang dan CPNS sebanyak 3 orang, pegawai pada golongan ini umumnya terdiri dari jabatan fungsional umum dan fungsional tertentu seperti tenaga teknis dan tenaga guru. Pegawai terbanyak kedua berada di Golongan IV (30,75%) yang seluruhnya dari PNS berjumlah 1920 orang, pegawai pada golongan ini umumnya terdiri dari pegawai senior, berpendidikan minimal S1/S2, dan mempunyai masa kerja dan pengalaman kerja yang cukup lama, serta menduduki jabatan struktural menengah hingga tinggi atau jabatan fungsional ahli madya/utama. Pegawai di Golongan II (1,55%) terdiri dari dan PPPK 1 orang,

3. Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan

Berdasarkan tabel 2.1.3 di bawah, jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.3
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jenis ASN			Jumlah Pegawai	Persentase
	PNS	PPPK	CPNS		
SD	2	-	-	2	0,03%
SLTP/SMP	31	1	-	32	0,51%
SLTA/SMA/SMK	84	2	-	86	1,38%
DIPLOMA (D1-DIII)	59	-	-	59	0,94%
SARJANA (DIV/S1)	3183	2719	3	5.905	94,57%
SARJANA (S2/S3)	160	-	-	160	2,56%

Sumber : Sub Bagian Umum dan Keuangan, Agustus 2025

Tabel 2.1.3 menggambarkan tingkat pendidikan terakhir dari seluruh pegawai yang bertugas di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang pada Bulan Agustus Tahun 2025. Informasi ini menjadi sangat penting untuk menilai kapasitas intelektual dan kompetensi teknis aparatur sipil negara (ASN) yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik.

Distribusi Pendidikan Pegawai:

- Sebagian besar pegawai berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 5905 orang (94,57%). Ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh pegawai telah menyelesaikan pendidikan tinggi dan memenuhi kualifikasi akademik standar yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas administrasi dan teknis pemerintahan.
- Sebanyak 160 orang (2,56%) berpendidikan Pascasarjana (S2/S3). Ini mencerminkan keberadaan ASN dengan latar belakang akademik lanjut yang sangat potensial untuk mendukung penyusunan kebijakan, perencanaan strategis, dan pengembangan inovasi pelayanan di kecamatan.
- Pegawai dengan latar belakang pendidikan menengah (SLTA/SMA/SMK) sebanyak 86 orang (1,38%). Kelompok ini kemungkinan besar menduduki jabatan pelaksana teknis atau administratif non-struktural.
- Pegawai yang berasal dari jenjang pendidikan Diploma (D1–D3) sebanyak 59 orang (0,94%), yang biasanya menjadi jalur karier ASN pelaksana dengan spesialisasi teknis tertentu.

- e. Pegawai yang berasal dari jenjang pendidikan SD hanya ada 2 orang (0,03%) dan SLTP/SMP sebanyak 32 orang (0,51%). Ini umumnya diisi oleh ASN angkatan lama.

Implikasi Strategis:

- a. Kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tergolong baik, karena seluruh pegawai memiliki latar belakang pendidikan menengah ke atas, dan 97,13% pegawai sudah menyelesaikan pendidikan tinggi (S1 ke atas).
- b. Tingkat pendidikan tinggi membuka peluang untuk penguatan kompetensi teknis dan manajerial, terutama dalam rangka mendukung implementasi reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, dan pendekatan berbasis data (evidence-based policy).

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa komposisi tingkat pendidikan ASN di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang menunjukkan profil yang cukup kompten dan berpendidikan tinggi, dengan dominasi lulusan S1 ke atas. Hal ini menjadi modal penting dalam mendukung peran Dinas Pendidikan sebagai pelaksana administrasi yang responsif, profesional, dan inovatif.

- 4. Jumlah pegawai menurut jabatan
- Berdasarkan tabel 2.1.4 di bawah, jumlah pegawai menurut jabatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.4
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Jabatan	Jenis ASN			Jumlah Pegawai	Persentase
	PNS	PPPK	CPNS		
Jabatan Fungsional Tertentu	3.304	941	3	4.248	68,03%
Jabatan Fungsional Umum	206	1.781	-	1.987	31,82%
Jabatan Struktural	9	-	-	9	0,14%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, 2025

Tabel 2.1.4 menyajikan data klasifikasi pegawai berdasarkan jenis jabatan yang mereka emban, yakni jabatan struktural, fungsional, dan pelaksana. Pemahaman terhadap struktur jabatan sangat penting dalam analisis kapasitas organisasi dan perencanaan pengembangan aparatur sipil negara (ASN).

Distribusi Jabatan Pegawai:

- a. Sebagian besar ASN Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang menduduki jabatan Fungsional Tertentu yang menjadi bagian penting untuk mendukung tugas berbasis kompetensi dan profesionalisme teknis tertentu seperti Guru Ahli, Pengawas, Perencana, Pranata komputer, dsb, yakni sebanyak 4248 orang atau 68,03% dari total pegawai.
- b. Jabatan struktural menempati posisi dengan tanggung jawab manajerial dan pengambilan keputusan diisi oleh 9 orang, kebutuhan ini masih kurang dari kebutuhan 15 orang jabatan struktural di Dinas Pendidikan.
- c. Jabatan fungsional umum diisi oleh 1987 orang (31,82%), yang kemungkinan besar bertanggung jawab terhadap tugas teknis administratif, operasional, dan pendukung kegiatan pelayanan masyarakat.

Implikasi Strategis:

- a. Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang memiliki struktur organisasi yang cukup seimbang karena tidak didominasi pegawai pada jabatan struktural melainkan ditunjang dengan jumlah pegawai fungsional dan pelaksana. Hal ini penting untuk keseimbangan dalam fungsi manajerial dan pelaksana teknis.
- b. Perlu optimalisasi pengembangan kompetensi ASN yang sudah ada untuk meningkatkan profesionalisme birokrasi, pelayanan publik, mendorong efektivitas dan efisiensi kerja, serta menciptakan SDM yang adaptif, responsif dan mampu menghadapi tantangan di era transformasi digital.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa struktur jabatan ASN di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang pada tahun 2025 sudah cukup seimbang dengan jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum yang relatif cukup.

5. Jumlah pegawai menurut jenis kelamin

Berdasarkan tabel 2.1.5 di bawah, jumlah pegawai menurut jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.5
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jenis ASN			Jumlah Pegawai	Persentase
	PNS	PPPK	CPN S		
Laki-laki	798	1.248	1	2.047	32,78%
Perempuan	1.924	2.271	2	4.197	67,22%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Agustus 2025

Tabel 2.1.5 menyajikan distribusi pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang berdasarkan jenis kelamin. Analisis ini penting untuk mengetahui tingkat representasi gender dalam struktur organisasi Dinas Pendidikan, sekaligus menjadi salah satu indikator dalam penerapan prinsip kesetaraan dan keadilan gender (gender equity).

Distribusi Pegawai Menurut Jenis Kelamin:

- a. Sebagian besar pegawai adalah perempuan, yakni sebanyak 4197 orang atau 67,22% dari total pegawai. Ini menunjukkan bahwa perempuan mendominasi komposisi sumber daya aparatur di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, pegawai perempuan umumnya sebagai Tenaga Guru Ahli.
- b. Jumlah pegawai laki-laki sebanyak 2047 orang (32,78%), artinya kurang dari separuh total pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang adalah laki-laki.

Implikasi Strategis:

- a. Tingginya proporsi pegawai perempuan memerlukan dukungan kebijakan yang responsif gender, seperti cuti melahirkan, fleksibilitas kerja, dan fasilitas penitipan anak. Hal ini akan meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi potensi masalah terkait beban ganda (pekerjaan–rumah tangga).
- b. Dengan mayoritas pegawai adalah perempuan (67,22%), perlu strategi untuk mendorong keterlibatan mereka dalam posisi manajerial/struktural agar tidak hanya terfokus pada peran teknis (guru ahli).

Dengan demikian, distribusi pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang menunjukkan dominasi perempuan (67,22%) dibandingkan laki-laki (32,78%). Kondisi ini mencerminkan pentingnya penerapan kebijakan yang responsif gender untuk

mendukung kesejahteraan dan produktivitas pegawai perempuan, sekaligus memastikan kesetaraan kesempatan dalam pengembangan karier dan kepemimpinan. Dengan demikian, penguatan perspektif gender dalam manajemen sumber daya aparatur menjadi kunci untuk mewujudkan organisasi yang lebih inklusif, adil, dan berdaya.

6. Jumlah pegawai menurut jenis kelamin dan jabatan

Berdasarkan tabel 2.1.6 di bawah, jumlah pegawai menurut jabatan dan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.6

Jumlah Pegawai Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jenis ASN	Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Fungsional Umum	Jabatan Struktural	Jumlah Pegawai
Laki-laki	CPNS	1	-	-	1
	PNS	1.106	135	7	1.248
	PPPK	273	525	-	798
Perempuan	CPNS	2	-	-	2
	PNS	2.198	71	2	2.271
	PPPK	668	1.256	-	1.924
Jumlah Pegawai		4.248	1.987	9	6.244
Persentase		68,03%	31,82%	0,14%	

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, 2025

Berdasarkan Tabel 2.1.6, jumlah pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang pada tahun 2025 tercatat sebanyak 6.244 orang. Dari jumlah tersebut, sebagian besar menduduki Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 4.248 orang (68,03%), sementara Jabatan Fungsional Umum berjumlah 1.987 orang (31,82%), dan Jabatan Struktural hanya sebanyak 9 orang (0,14%). Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur sumber daya manusia di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang masih didominasi oleh tenaga fungsional, khususnya guru dan tenaga pendidik, sementara jabatan struktural relatif sangat terbatas.

Jika dilihat dari komposisi gender, jumlah pegawai perempuan mencapai 4.197 orang (67,22%), jauh lebih tinggi dibandingkan pegawai laki-laki yang berjumlah 2.047 orang (32,78%). Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan menjadi kelompok mayoritas dalam struktur aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Namun demikian, dari sisi distribusi jabatan, keterwakilan

perempuan dalam jabatan struktural masih rendah, yaitu hanya 2 orang dari total 9 pejabat struktural (22,2%). Sebaliknya, laki-laki meskipun jumlahnya lebih sedikit secara keseluruhan, masih mendominasi jabatan struktural (7 orang).

Berdasarkan status kepegawaiannya, PNS masih menjadi kelompok terbesar dengan jumlah 3.519 orang, disusul oleh PPPK sebanyak 2.722 orang, sementara jumlah CPNS sangat kecil yakni hanya 3 orang. Hal ini mengindikasikan bahwa regenerasi ASN melalui rekrutmen CPNS relatif terbatas, sehingga berpotensi memengaruhi kesinambungan sumber daya aparatur di masa depan.

Implikasi Strategis:

- a. Dominasi pegawai pada jabatan fungsional tertentu menegaskan pentingnya penguatan kapasitas guru dan tenaga pendidik. Pengembangan kompetensi, pelatihan berkelanjutan, serta penataan jalur karier fungsional perlu diperkuat agar mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sumedang
- b. Meskipun perempuan mendominasi jumlah pegawai, keterwakilan mereka dalam jabatan struktural masih rendah. Oleh karena itu, perlu adanya strategi afirmatif untuk mendorong perempuan menduduki posisi kepemimpinan, sehingga prinsip kesetaraan gender dapat terwujud secara nyata dalam struktur organisasi.

B.2 Sarana dan prasarana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, ASN didukung oleh perangkat kerja yang harus tersedia dalam organisasi sesuai dengan yang tercantum dalam analisis jabatan. Hal ini bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1.7
Data Perangkat Kerja ASN yang Dapat Mendukung Kinerja ASN Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang

No	Nama jabatan	Perangkat kerja (Sesuai Anjab ABK)	Realisasi Perangkat kerja	Keterangan
1.	Kepala Dinas	1. Printer 2. Komputer 3. Jar. Internet 4. Telepon	1. Printer 2. Komputer 3. Jar. internet	

No	Nama jabatan	Perangkat kerja (Sesuai Anjab ABK)	Realisasi Perangkat kerja	Keterangan
		5. ATK 6. Kendaraan	4. Telepon 5. ATK 6. Kend. Roda 4	
2.	Sekretaris Kepala Dinas	1. Printer 2. Komputer 3. Telepon 4. ATK 5. Kendaraan	1. Printer 2. Komputer 3. Telepon 4. ATK 5. Kend. Roda 4	
3.	Kepala Seksi Sekolah	1. Printer 2. Komputer 3. Telepon 4. ATK 5. Kendaraan	1. Printer 2. Komputer 3. Telepon 4. ATK 5. Kend. Roda 2	
4	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Printer 2. Komputer 3. Jar. internet 4. Telepon 5. ATK 6. Kendaraan	1. Printer 2. Komputer 3. Jar. Internet 4. Telepon 5. ATK 6. Kend. Roda 2	
5	Kepala Seksi Pelayanan Publik	1. Internet 2. Telepon 3. Printer 4. Kendaraan	1. Internet 2. Telepon 3. Printer 4. Kend. Roda 2	
6.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1. ATK 2. Komputer/ Laptop 3. Printer 4. Flashdisk 5. Internet 6. Alat transportasi	1. ATK 2. Komputer 3. Printer 4. Flashdisk 5. Internet 6. Kend. Roda 2	

No	Nama jabatan	Perangkat kerja (Sesuai Anjab ABK)	Realisasi Perangkat kerja	Keterangan
		7. Perangkat Komunikasi	7. Telepon	
7	Kepala Seksi Pemerintahan Umum	1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Telepon 5. Kendaraan	1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Telepon 5. Kend. Roda 2	
8	Kasubag Umum	1. Internet 2. Telepon 3. Komputer 4. Printer 5. ATK 6. Kendaraan	1. Internet 2. Telepon 3. Komputer 4. Printer 5. ATK 6. Kend. Roda 2	
9	Kasubag Prog dan Keu	1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Telepon 5. Kendaraan	1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Telepon 5. Kend. Roda 2	
10	Pengelola Keuangan	1. Komputer dan Perangkatnya 2. Koneksi internet 3. ATK	1. Laptop 2. Printer 3. Internet 4. ATK	
11	Pengelola Pemanfaatan Brg Milik Daerah	1. Komputer 2. Telepon/HP 3. Meja Kerja 4. Kursi 5. Laptop 6. Printer 7. ATK 8. Jaringan Internet	1. Komputer 2. Telepon 3. Meja Kerja 4. Kursi 5. Printer 6. ATK 7. Internet	

Kesesuaian antara Perangkat Kerja Anjab-ABK dan Realisasi

Secara umum, perangkat kerja yang dibutuhkan oleh masing-masing jabatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang telah direalisasikan dengan cukup baik dan relatif sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Setiap pejabat struktural maupun pelaksana memiliki akses terhadap perangkat pendukung kerja utama seperti komputer/laptop, printer, jaringan internet, telepon, dan alat transportasi.

Ketersediaan Alat Transportasi

1. Kepala Dinas dan Sekretaris Kepala Dinas masing-masing telah difasilitasi dengan kendaraan roda 4, yang relevan dengan mobilitas tinggi serta tanggung jawab koordinasi lintas sektoral.
2. Kepala Seksi dan Kasubag sebagian besar menggunakan kendaraan roda 2, yang masih memadai untuk operasional wilayah, meskipun keterbatasan kapasitas angkut atau medan tertentu mungkin menjadi tantangan.

Perangkat Teknologi dan Komunikasi

1. Hampir seluruh jabatan telah memiliki perangkat dasar seperti komputer/laptop dan printer.
2. Koneksi internet dan telepon telah tersedia secara merata untuk seluruh jabatan, mendukung digitalisasi pelayanan dan komunikasi internal.
3. Beberapa jabatan seperti Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang Milik Daerah sudah menggunakan perangkat teknologi tambahan seperti flashdisk, meja kerja, kursi, dan komputer/laptop terpisah, menunjukkan adanya penyesuaian dengan kebutuhan spesifik.

Jabatan Fungsional dan Pendukung

1. Jabatan pelaksana seperti Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang Milik Daerah menunjukkan kecenderungan menggunakan perangkat kerja campuran, yaitu perangkat utama (komputer, printer, internet) serta perangkat pendukung ergonomis seperti meja dan kursi kerja. Ini mencerminkan

pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan nyaman, sekaligus mendorong produktivitas pegawai.

Catatan dan Rekomendasi:

1. Kesesuaian Alat Kerja perlu dipertahankan dan dievaluasi berkala sesuai dengan perkembangan tugas, teknologi baru, serta beban kerja yang meningkat.
2. Optimalisasi pemanfaatan perangkat kerja, seperti printer bersama atau jaringan internet bersama, bisa menjadi pendekatan efisien pada kondisi keterbatasan anggaran.
3. Usulan peningkatan alat kerja berbasis fungsi, terutama untuk pelaksana teknis dan jabatan fungsional di masa depan, perlu disiapkan agar pelayanan publik semakin responsif dan modern.
4. Pemetaan kebutuhan berbasis digitalisasi, seperti perangkat konferensi daring, scanner, dan sistem manajemen dokumen elektronik juga perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pengadaan ke depan.

Dengan demikian dapat disimpulkan pemenuhan perangkat kerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang secara umum telah memenuhi standar minimal Anjab-AKB. Realisasi perangkat kerja telah mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan, meskipun evaluasi rutin dan penyelarasan dengan teknologi terkini sangat disarankan untuk menjaga efisiensi dan kualitas pelayanan publik.

C. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang

Sebagai unit kerja pemerintahan yang berada di garis terdepan dalam menjembatani hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang memiliki tanggungjawab besar dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan akuntabel. Selama periode 5 tahun terakhir, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang telah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui perbaikan proses administratif, peningkatan kapasitas aparatur, serta penyederhanaan alur

pelayanan. Komitmen ini dilandasi oleh semangat reformasi birokrasi dan dorongan untuk menghadirkan layanan pemerintahan yang semakin dekat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pelayanan yang menjadi fokus utama Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang meliputi layanan administrasi kependidikan, pelayanan perizinan tertentu yang dilimpahkan dari pemerintah kabupaten, legalisasi dokumen, hingga layanan surat menyurat untuk keperluan sosial kemasyarakatan. Selain itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang juga berperan aktif dalam pembangunan digitalisasi sarana dan prasarana Sekolah, pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta penerimaan Murid baru. Untuk mendukung pelayanan tersebut, telah diimplementasikan sistem informasi profiling Sekolah yang sudah terintegrasi dengan data pokok pendidikan.

Namun, dari sisi infrastruktur pelayanan, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang masih menghadapi sejumlah kendala mendasar. Salah satu kelemahan yang cukup menonjol adalah kondisi ruang pelayanan yang belum representatif. Hingga saat ini, ruang pelayanan yang tersedia masih terbatas secara ukuran, kenyamanan dan kelengkapan fasilitas penunjang. Belum tersedia ruang laktasi, ruang ramah anak, serta akses dan fasilitasi khusus bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia (lansia). Ketidadaan ruang-ruang ini menunjukkan bahwa pelayanan yang inklusif dan berkeadilan belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini menjadi catatan penting dalam pengembangan pelayanan publik Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang ke depan agar mampu menjawab kebutuhan semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan.

Ke depan, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan tata kelola internal, penyediaan sarana prasarana yang inklusif dan ramah kelompok rentan, serta percepatan transformasi digital. Rencana pengembangan aplikasi layanan sederhana berbasis web, pelatihan rutin bagi petugas *front office*, serta kerjasama lintas sektor dengan dinas terkait merupakan bagian dari strategis peningkatan kinerja pelayanan. Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang dapat

menjadi Dinas Pendidikan yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat dalam setiap bentuk pelayanannya.

Untuk mengukur kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, salah satu instrumen penting yang digunakan adalah survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Survei ini dilakukan secara berkala setiap tahun sebagai bagian dari upaya evaluasi kinerja pelayanan kepada masyarakat, sekaligus menjadi bahan refleksi dan dasar perumusan kebijakan perbaikan layanan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencerminkan persepsi masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap berbagai aspek pelayanan, seperti kecepatan, ketepatan, keramahan petugas, kemudahan prosedur, serta sarana dan prasarana pendukung. Hasil pengukuran IKM memberikan gambaran yang objektif tentang sejauh mana penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang telah memenuhi ekspektasi masyarakat.

Selama periode 5 tahun terakhir, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang telah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui berbagai inisiatif perbaikan internal. Namun demikian, hasil survei IKM juga menunjukkan dinamika capaian dari tahun ke tahun, yang menjadi indikator penting bagi perencanaan strategis ke depan. Fluktuasi capaian IKM turut mencerminkan pengaruh dari berbagai faktor, baik internal seperti keterbatasan sumber daya dan sarana, maupun eksternal seperti perubahan kebijakan dan kondisi sosial masyarakat.

Berikut disajikan Tabel Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang selama kurun waktu Tahun 2020 hingga 2024. Data ini menjadi evaluasi sekaligus dasar perumusan strategi peningkatan pelayanan dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029.

Tabel 2.1.8
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang

NO	INDIKATOR	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET SDGs	TARGET RENSTRA SKPD					REALISASI				
					TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi nilai kompetensi minimum				-	40,15	46,84	53,53	58,88			65,16	70,43	82,67
2	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi nilai kompetensi minimum				-	23,42	26,77	30,11	33,12			48,61	54,50	77,90
3	Nilai siswa dengan tingkat karakter yang memenuhi kriteria minimal				-	-	-	-	2,16			-	-	59,14
4	Tingkat partisipasi warga begara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini				-	99,10	100	100				92,04	92,38	94,01
5	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan sekolah dasar				-	98,86	100	100				97,46	97,31	97,01
6	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan sekolah menengah pertama				-	98,85	100	100				90,27	91,55	94,35
7	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam pendidikan kesetaraan				-	92,47	100	100				53,47	59,60	97,92
8	Persentase siswa bersartifikat Diniyah				-	100	100	100						
9	Persentase Daya Tampung SD				-	94,02	94,31	94,45						
10	Persentase Daya Tampung SMP				-	117,68	117	116						

Sumber : Bagian Program

Berdasarkan tabel indikator kinerja pembangunan pendidikan, secara umum kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, khususnya pada aspek mutu pembelajaran dan akses layanan pendidikan dasar. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan Renstra 2025–2029.

1. Peningkatan Mutu Literasi dan Numerasi

Persentase siswa yang mencapai kompetensi minimum literasi dan numerasi menunjukkan kenaikan yang konsisten dan signifikan. Pada tahun 2024, capaian literasi mencapai **82,67%** dan numerasi **77,90%**, melampaui target Renstra sebelumnya. Hal ini mencerminkan efektivitas intervensi peningkatan mutu pembelajaran. Ke depan, fokus diarahkan pada pemerataan mutu antarwilayah dan satuan pendidikan, khususnya di daerah dengan capaian masih rendah.

2. Penguatan Pendidikan Karakter

Indikator nilai siswa dengan tingkat karakter yang memenuhi kriteria minimal baru menunjukkan capaian pada tahun 2024 sebesar **59,14%**. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penguatan pendidikan karakter masih memerlukan perhatian serius, baik melalui integrasi dalam pembelajaran, budaya sekolah, maupun keterlibatan keluarga dan masyarakat.

3. Akses dan Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Tingkat partisipasi anak usia 5–6 tahun dalam pendidikan usia dini menunjukkan capaian yang relatif tinggi, meskipun realisasi tahun 2024 sebesar **94,01%** masih berada di bawah target Renstra. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan layanan PAUD, khususnya di wilayah dengan keterbatasan sarana dan tenaga pendidik.

4. Pemerataan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah

Tingkat partisipasi usia 7–12 tahun (SD) dan 13–15 tahun (SMP) tergolong tinggi, namun realisasi pada beberapa tahun masih berada di bawah target 100%. Hal ini menandakan adanya tantangan dalam pemerataan akses, terutama terkait faktor geografis, sosial, dan ekonomi masyarakat.

5. Pendidikan Kesetaraan

Partisipasi warga usia 7–18 tahun dalam pendidikan kesetaraan menunjukkan peningkatan tajam pada tahun 2024 dengan capaian **97,92%**. Capaian ini mencerminkan keberhasilan program penjangkauan kelompok rentan dan putus sekolah, yang perlu terus diperkuat dan dipertahankan pada periode Renstra berikutnya.

6. Sertifikasi Pendidikan Keagamaan

Persentase siswa bersertifikat diniyah telah mencapai target **100%**, menunjukkan keberhasilan sinergi pendidikan formal dan keagamaan dalam mendukung pembentukan karakter peserta didik.

7. Daya Tampung Satuan Pendidikan

Daya tampung SD dan SMP berada pada kategori memadai, bahkan pada jenjang SMP melebihi 100%. Kondisi ini mengindikasikan ketersediaan kapasitas yang cukup, namun perlu diimbangi dengan penataan distribusi peserta didik, peningkatan kualitas sarana prasarana, serta pemerataan guru agar tidak terjadi kelebihan kapasitas di satu wilayah dan kekurangan di wilayah lain.

D. Kelompok Sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang

Kelompok sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang adalah seluruh masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Sumedang, baik perorangan maupun kelompok, yang memiliki kebutuhan untuk memperoleh pelayanan publik dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Kelompok sasaran ini meliputi berbagai lapisan masyarakat dengan berbagai latar belakang dan kepentingan yang memerlukan administrasi kependidikan, perizinan, surat-menyurat, serta pelayanan pendidikan lainnya.

Kelompok sasaran tersebut meliputi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Siswa dan Satuan Pendidikan baik negeri maupun swasta yang berinteraksi dengan penyelenggaraan urusan Pendidikan. Dengan demikian, diharapkan pelayanan yang diberikan dapat menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat secara adil, transparan,

dan akuntabel serta mendukung terwujudnya pelayanan yang berkualitas dan inklusif di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

E. Mitra Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang

Mitra Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang terdiri atas berbagai pemangku kepentingan yang memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan. Kerja sama yang terjalin melibatkan perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumedang, lembaga pendidikan formal dan nonformal, organisasi profesi, serta lembaga masyarakat. Setiap mitra berperan dalam memperkuat koordinasi, menyediakan dukungan teknis maupun fasilitas, serta memastikan program pendidikan berjalan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah. Sinergi tersebut menjadi fondasi penting untuk mendorong terciptanya layanan pendidikan yang merata, inklusif, dan berkualitas.

Peran kemitraan semakin diperkuat melalui kolaborasi multipihak dalam pengembangan kebijakan, pelaksanaan program, serta monitoring dan evaluasi. Pemerintah daerah, instansi vertikal, organisasi profesi, lembaga masyarakat, dan perguruan tinggi diharapkan dapat berkontribusi secara aktif dalam penguatan kompetensi pendidik, digitalisasi layanan pendidikan, pengembangan karakter peserta didik, serta peningkatan sarana prasarana pendidikan. Dengan dukungan kolaboratif dari seluruh mitra strategis ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang menargetkan tercapainya transformasi pendidikan yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan demi mewujudkan generasi Sumedang yang unggul dan berdaya saing.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang

Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berkeadilan kepada masyarakat. Berbagai program telah dilaksanakan, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang Pendidikan dan pelayanan publik, hingga pembinaan dan pengawasan Sekolah. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat sejumlah kendala

yang mempengaruhi optimalisasi hasil dan kualitas layanan yang diberikan.

Permasalahan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, tetapi juga mencakup aspek pemerataan akses, kecepatan respons, dan keberlanjutan inovasi layanan. Di tengah dinamika perubahan lingkungan strategis baik di tingkat global, nasional, maupun regional, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang dituntut mampu mengantisipasi tantangan serta memanfaatkan peluang untuk meningkatkan kualitas kinerja.

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis, arah fokus perbaikan ke depan akan mengerucut pada pemerataan aksesibilitas dan pelayanan Pendidikan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat layanan secara setara, cepat, dan profesional. Fokus inilah yang akan menjadi isu strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang pada periode perencanaan 2025–2029.

A. Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang

Dalam upaya mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan pelayanan Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang masih menghadapi sejumlah permasalahan yang menjadi tantangan strategis selama periode perencanaan 2025–2029. Permasalahan ini merupakan hasil identifikasi dari berbagai sumber, termasuk evaluasi capaian kinerja, penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat, serta analisis terhadap isu-isu strategis baik dari aspek lokal maupun nasional dan global. Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang diuraikan sebagai berikut:

1. Jumlah warga negara yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)

Permasalahan terkait Angka Partisipasi Sekolah (APS) masih menjadi tantangan dalam upaya pemerataan akses pendidikan di Kabupaten Sumedang. Meskipun terjadi peningkatan pada beberapa jenjang, masih terdapat kelompok usia yang belum sepenuhnya terlibat dalam pendidikan akibat faktor ekonomi keluarga, rendahnya kesadaran pentingnya pendidikan, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta keterbatasan sarana prasarana di wilayah tertentu.

Selain itu, mobilitas penduduk, kasus putus sekolah, dan keterlibatan anak dalam aktivitas pekerjaan informal turut berkontribusi pada rendahnya partisipasi. Situasi ini menunjukkan perlunya intervensi yang lebih komprehensif agar seluruh warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan secara layak dan berkelanjutan.

2. Rata-rata kemampuan Literasi dan Numerasi berdasarkan Asesmen Nasional

Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi berdasarkan hasil Asesmen Nasional masih menunjukkan tantangan yang signifikan, terutama dalam hal kemampuan peserta didik memahami bacaan secara mendalam serta menyelesaikan masalah matematis berbasis pemecahan masalah. Hasil asesmen mengindikasikan bahwa sebagian peserta didik belum mencapai kompetensi minimum, yang dipengaruhi oleh variasi kualitas pembelajaran, keterbatasan bahan ajar yang mendukung, serta pemanfaatan asesmen formatif yang belum optimal di sekolah. Selain itu, kesenjangan capaian antarwilayah dan antarsekolah semakin mempertegas perlunya penguatan kapasitas guru, peningkatan kualitas proses belajar mengajar, serta penyediaan dukungan pembelajaran yang lebih merata agar kemampuan literasi dan numerasi peserta didik dapat meningkat secara berkelanjutan.

3. Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B

Proporsi satuan PAUD yang memperoleh minimal akreditasi B masih menghadapi tantangan akibat ketidaksiapan lembaga dalam memenuhi standar nasional pendidikan anak usia dini. Banyak satuan PAUD yang masih mengalami keterbatasan dalam hal kualifikasi pendidik, kelengkapan sarana prasarana, serta pengelolaan kelembagaan yang sesuai dengan standar akreditasi. Selain itu, variasi pemahaman terhadap implementasi kurikulum dan keterbatasan pendampingan mutu dari berbagai pihak turut memengaruhi rendahnya capaian akreditasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan pembinaan, penguatan kapasitas pendidik dan pengelola, serta dukungan sarana prasarana secara lebih merata agar seluruh satuan PAUD dapat mencapai

standar layanan yang berkualitas dan memenuhi minimal akreditasi B.

4. Iklim Keamanan, Iklim Kebinekaan, dan Iklim Inklusivitas

Permasalahan terkait iklim keamanan, kebinekaan, dan inklusivitas di lingkungan pendidikan masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Beberapa satuan pendidikan belum sepenuhnya mampu menciptakan suasana belajar yang aman, bebas dari perundungan, serta memberikan perlindungan optimal bagi seluruh peserta didik. Di sisi lain, pemahaman dan praktik kebinekaan belum merata, ditandai dengan masih adanya stereotip, sikap eksklusif, dan kurangnya ruang dialog yang mendorong penghargaan terhadap perbedaan budaya, agama, maupun latar belakang sosial. Selain itu, penerapan pendidikan inklusif belum sepenuhnya berjalan efektif karena keterbatasan kompetensi tenaga pendidik, sarana pendukung, dan mekanisme layanan khusus bagi peserta didik berkebutuhan. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan budaya sekolah yang aman, ramah, dan menghargai keberagaman, sehingga seluruh peserta didik dapat belajar dan berkembang dalam lingkungan yang nyaman, setara, dan inklusif.

Dengan demikian, isu strategis utama Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang adalah pemerataan aksesibilitas dan pelayanan Pendidikan, baik dari aspek sumber daya manusia, infrastruktur pelayanan, maupun pemerataan akses pelayanan dasar. Permasalahan ini harus menjadi prioritas dalam perumusan strategi dan program kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang pada periode 2025–2029, guna menjamin pelayanan yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

B. Isu Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang

Dalam rangka mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan pelayanan Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang menghadapi sejumlah isu strategis yang perlu dijadikan fokus utama dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan lima tahun ke depan. Isu strategis ini disusun dengan mempertimbangkan hasil analisis terhadap kondisi pelayanan saat ini, potensi daerah,

permasalahan internal perangkat daerah, isu pembangunan berkelanjutan (KLHS), serta dinamika lingkungan strategis baik global, nasional, maupun regional.

Selain isu strategis terkait pelayanan pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang juga dihadapkan pada isu strategis daerah lainnya. Karena pada prinsipnya isu strategis daerah Kabupaten Sumedang dirumuskan dari permasalahan-permasalahan yang terdapat di seluruh wilayah administratif Kabupaten Sumedang. Disamping itu Dinas Pendidikan memiliki kewenangan koordinatif untuk dapat menyusun kebijakan di dalam instansinya . Oleh karena itu dalam Renstra ini, isu strategis Kabupaten Sumedang juga dimuat untuk merumuskan Isu Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Isu strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang menggunakan teknik perumusan yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang

NO	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah warga negara yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Daftar anak putus sekolah		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Olahraga, Kesenjangan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, Dan Penyandang Disabilitas	Terbentuknya Individu Berpengetahuan dan Berwawasan	Belum Meratanya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan	Aksesibilitas dan pelayanan pendidikan belum merata
		Ketidakmampuan untuk memenuhi biaya personal merupakan salah satu faktor penyebab utama anak usia 5-6 tahun dari keluarga miskin belum mendapatkan layanan pendidikan di PAUD ataupun di SD/MI		Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam, Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat			

				yang Adil Dan Makmur			
		Daya tampung satuan pendidikan bagi anak usia sekolah					
		Pemenuhan Kebutuhan Guru					
		Pemenuhan gizi peserta didik					
		Kualitas Pembelajaran					
2.	Rata-rata kemampuan Literasi dan Numerasi berdasarkan Asesmen Nasional	Pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan					Capaian hasil belajar peserta didik belum optimal
		Penugasan guru sebagai kepala sekolah/pendamping satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan					
		Indeks Refleksi dan Perbaikan Pembelajaran oleh Pendidik					
		Kualitas pembelajaran					
		Kecukupan buku teks dan non teks yang berkualitas					
		Peralatan TIK dan alat praktik belajar literasi dan numerasi					
3.	Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Pemahaman tentang layanan berkualitas bagi satuan PAUD				Layanan Pendidikan pada satuan PAUD belum optimal	Layanan Pendidikan pada satuan PAUD belum optimal
		Refleksi dan Perbaikan Pembelajaran oleh Pendidik					
		Proporsi PTK dalam Diklat Teknis					
		Karakter peserta didik					
4.	Iklim Keamanan, Iklim Kebinekaan, dan Iklim Inklusivitas	Pemahaman dan sistem pelayanan pendampingan terkait keamanan untuk mencegah perundungan, kekerasan seksual, dan hukuman fisik				Masih Terjadinya Bullying di Satuan Pendidikan	Pencegahan perundungan, kekerasan seksual, dan hukuman fisik belum optimal

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang

Berdasarkan hasil identifikasi potensi daerah yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, diketahui bahwa ketersediaan sumber daya manusia (SDM) serta sarana dan prasarana pelayanan publik merupakan faktor penunjang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan responsif. Namun demikian, masih terdapat sejumlah permasalahan mendasar,

antara lain kompetensi SDM yang belum optimal, keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan publik yang belum sepenuhnya inklusif, serta ketimpangan aksesibilitas layanan di bidang Pendidikan Kabupaten Sumedang. Selain itu, reformasi birokrasi yang belum berjalan optimal juga menjadi tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Sejalan dengan hal tersebut, isu KLHS RPJMD Kabupaten Sumedang yang relevan menunjukkan perlunya peningkatan kualitas regulasi, koordinasi perencanaan, serta pengelolaan pendidikan yang mendukung pelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan. Isu-isu ini juga harus diselaraskan dengan dinamika lingkungan strategis baik pada tingkat global, nasional, regional, maupun lokal. Pada skala global, Goal 16 Sustainable Development Goals (SDGs) menekankan pentingnya mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Pada tingkat nasional, Prioritas Nasional ke-7 menegaskan perlunya penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pemberantasan praktik-praktik penyimpangan seperti korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Pada level regional (Provinsi Jawa Barat), fokus diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif, sedangkan di tingkat lokal (Kabupaten Sumedang) ditekankan pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang profesional dengan aparatur yang berintegritas.

Dengan memperhatikan potensi, permasalahan, isu pembangunan berkelanjutan, serta dinamika lingkungan strategis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa arah kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang harus difokuskan pada upaya penyelenggaraan pelayanan publik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara merata, adil, dan inklusif. Oleh karena itu, **isu strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang adalah pemerataan aksesibilitas dan pelayanan Pendidikan, baik dari aspek sumber daya manusia, infrastruktur pelayanan, maupun pemerataan akses pelayanan dasar.**

Isu strategis ini akan menjadi fondasi utama dalam merumuskan tujuan, sasaran, arah kebijakan, serta program dan kegiatan prioritas Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang pada

periode perencanaan mendatang. Penanganan isu ini secara konsisten akan menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif, inklusif, dan berdaya saing.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat rumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang yang menjadi landasan dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025–2029. Perumusan komponen ini merupakan tindak lanjut dari hasil identifikasi permasalahan dan isu strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, khususnya terkait upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang inklusif sebagai fokus pembangunan lima tahun ke depan.

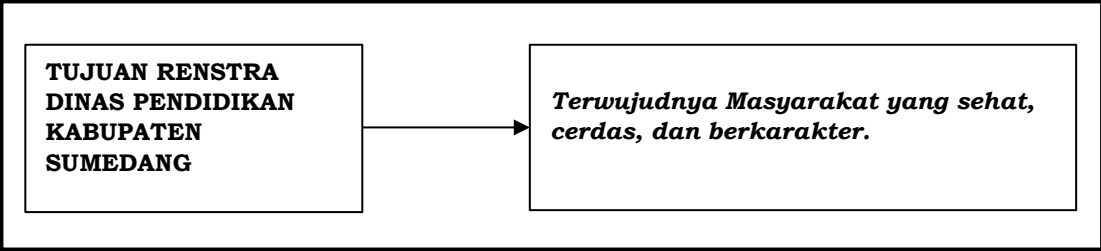
Tujuan dan sasaran disusun untuk memberikan gambaran capaian yang ingin diraih secara terukur, baik dalam bentuk peningkatan kinerja pelayanan maupun penguatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan. Strategi ditetapkan sebagai pendekatan menyeluruh untuk mencapai sasaran tersebut, sedangkan arah kebijakan berfungsi sebagai panduan operasional yang mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan agar konsisten dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah.

Dengan perencanaan yang terintegrasi dan berbasis pada data, diharapkan seluruh perangkat di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang dapat bergerak secara sinergis dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, profesional, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

3.1. Tujuan Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan tersebut merupakan Sasaran RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029. Adapun tujuan Dinas Pendidikan adalah:

“Terwujudnya Masyarakat yang sehat, cerdas, dan berkarakter”



Tujuan ini menekankan upaya Dinas Pendidikan dalam memastikan seluruh masyarakat mendapatkan layanan pendidikan yang merata, berkualitas, dan inklusif. Pemerataan akses dilakukan melalui penyediaan sarana prasarana yang memadai, distribusi guru yang proporsional, peningkatan penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk memperkuat mutu pembelajaran melalui implementasi kurikulum yang relevan, peningkatan kompetensi guru, serta penguatan tata kelola sekolah.

Secara keseluruhan, sasaran ini diharapkan mampu mewujudkan layanan pendidikan yang berkeadilan, meningkatkan mutu proses belajar, serta membentuk masyarakat yang literat, adaptif, dan siap menghadapi tantangan perkembangan zaman.

3.2. Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029

Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mewujudkan peningkatan Pemerataan Aksesibilitas dan Penyelenggaraan Pendidikan Serta Literasi Masyarakat.

Sasaran tersebut tercakup dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah
- 2. Meningkatnya Serta Meratanya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan.

3.3. Strategi Renstra Dinas Pendidikan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 Tahun 2025-2029

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Dinas Pendidikan harus memiliki acuan

langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparaturnya maupun masyarakat. Oleh karena itu, penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang periode 2025-2029 dirumuskan berdasarkan perumusan strategi yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

No.	Strategi RPJMD
1	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
2	Peningkatan sumber daya manusia bidang pendidikan
3	Peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata
4	Pengembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan/non formal
5	Peningkatan literasi masyarakat secara menyeluruh untuk mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan

3.4. Arah Kebijakan Renstra Dinas Pendidikan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029

Untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan, arah kebijakan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang 2025-2029 difokuskan pada beberapa kebijakan utama berikut:

A. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1. Penetapan standar pelayanan minimal untuk seluruh jenis layanan agar mudah dipahami masyarakat.
2. Penguatan sistem layanan berbasis digital, mencakup antrean online, layanan mandiri, dan pengaduan elektronik.
3. Edukasi serta sosialisasi digitalisasi layanan yang melibatkan masyarakat dalam survei kepuasan dan umpan balik.

B. Penguatan Sistem Perencanaan dan Akuntabilitas

1. Penerapan pengukuran kinerja berbasis output dan hasil di bidang Pendidikan, terhubung dengan IKM dan Zona Integritas.
2. Penguatan perencanaan partisipatif sekolah sebagai dasar perencanaan Dinas Pendidikan.
3. Pelaporan kinerja dan dokumen perencanaan dilakukan secara terbuka melalui forum Musrenbang dan media informasi publik.

C. Sinergi dan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah

- 1. Sinkronisasi kegiatan Dinas Pendidikan dengan arah kebijakan daerah dan perencanaan pendidikan yang relevan.
- 2. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah untuk menjaga keterpaduan pembangunan.

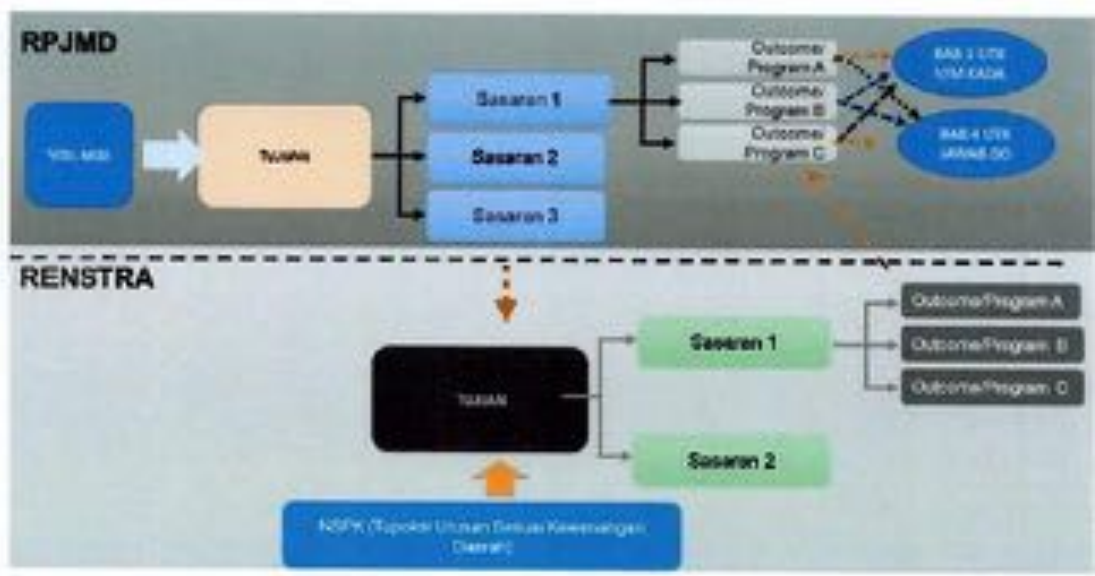
D. Partisipasi Masyarakat dan Tata Kelola Kolaboratif

- 1. Peningkatan kualitas pelibatan masyarakat melalui forum dialog pelayanan dan konsultasi publik.
- 2. Penguatan kapasitas masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan pengawasan pembangunan.

Gambar 3. 1
Konsep Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang



Gambar 3. 2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang



Tabel 3. 1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan											
- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah - Meningkatkan Pemanfaatan Akuntabilitas dan Peningkatan Pendidikan serta Literasi Masyarakat	Terwujudnya Masyarakat yang sejahtera, cerdas, dan berkeadilan		Rata-rata Lama Sekolah Persebut Usia 6 Rata 15 Tahun (Tahun)	8,79	8,75-8,82	8,77-8,81	8,79-8,81	8,81-8,83	8,82-8,85	8,83-8,86	
			Rangian Lama Sekolah (Tahun)	13,00	13,06	13,13	13,17	13,21	13,25	13,29	
			Rata-Rata LPPD Kabupaten (Rata)	3,80	3,847	3,848	3,849	3,85	3,857	3,862	
		Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Zero Integrity Peringkat Daerah (Nilai)	97,08	97,12	97,16	97,20	97,24	97,28	97,32	
		Meningkatnya Serta Menengah Akreditasi dan Mutu Pendidikan	Jumlah warga negara usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan (JPS) (%)	97,01	98,62	98,64	98,65	98,66	98,67	98,68	
			Jumlah Warga Negara Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan (JPS) (%)	94,30	95,76	95,78	95,79	95,8	95,81	95,82	
			Jumlah Warga Negara usia 16-18 tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan (JPS) (%)	96,31	94,11	94,17	94,20	94,27	94,30	94,40	
			Jumlah Warga Negara usia 17-18 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Keseluruhan (JPS) (%)	97,00	97,94	98,5	98,12	98,2	98,22	98,26	
			Rata - Rata Kemampuan Literasi Berbasis Rata-Rata Nasional (%)	80,50	84,08	84,48	84,76	84,88	85,08	85,13	
			Rata - Rata Kemampuan Numerasi Berbasis Rata-Rata Nasional (%)	80,20	81,72	82,10	82,42	82,60	82,70	82,77	

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa arah pembangunan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang mengacu pada penjabaran NSPK dan sasaran RPJMD Kabupaten Sumedang, yang fokus pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik serta akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintahan daerah.

Tujuan dinas pendidikan adalah terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan. Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan pada setiap jenjang, memperkuat pengembangan potensi peserta didik secara optimal, menanamkan nilai-nilai karakter, serta membangun budaya belajar yang mendukung kesehatan fisik, mental, dan sosial. Dengan demikian, pendidikan diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berdaya saing, berakhlak mulia, serta berkontribusi positif terhadap pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan adanya kesinambungan antara tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja yang terukur, guna mendukung tercapainya pelayanan publik yang berkualitas serta birokrasi pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

Tabel 3. 2
Penahapan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemerataan Aksesibilitas Pendidikan Ramah Lingkungan	Penguatan Pengelolaan Lingkungan Sekolah Yang Aman Dan Nyaman	Penguatan Pendidikan Dan Kurikulum Berbasis Lingkungan	Penguatan Budaya Sekolah Yang Mendukung Indonesia Emas	Perwujudan Sekolah Ramah Lingkungan Menuju Sumedang

Berdasarkan Tabel 3.2, strategi pembangunan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik disusun secara bertahap melalui lima fase yang terencana dan berkesinambungan. Penahapan ini dirancang untuk memastikan setiap tahap pembangunan memiliki fokus dan target yang terukur sehingga arah kebijakan dapat berjalan selaras dengan tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Tahap I (2026) merupakan tahap Penguatan Pelayanan Publik di Dinas Pendidikan, yang berfokus pada upaya penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur, serta perbaikan dasar sarana dan prasarana pelayanan publik. Pada fase ini, pondasi tata kelola yang baik mulai dibangun dengan prioritas pada pembenahan sistem pelayanan dan prosedur kerja.

Tahap II (2027) diarahkan pada Peningkatan Pelayanan Publik di Dinas Pendidikan, yang menitikberatkan pada penguatan kualitas output layanan melalui peningkatan kompetensi SDM, standardisasi pelayanan, serta optimalisasi ketersediaan fasilitas pendukung pelayanan.

Tahap III (2028) berfokus pada Optimalisasi Pelayanan Publik di Dinas Pendidikan, dengan menekankan pada efisiensi proses kerja, pemanfaatan teknologi informasi, dan perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan. Pada tahap ini, diharapkan sistem pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal dengan prosedur yang lebih efektif, cepat, dan transparan.

Tahap IV (2029) merupakan tahap Akselerasi Pelayanan Publik di Dinas Pendidikan, yaitu percepatan pelaksanaan inovasi pelayanan untuk menjawab dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Penekanan pada tahap ini adalah kolaborasi lintas sektor,

pemenuhan standar layanan minimum, serta peningkatan kepuasan masyarakat secara nyata.

Tahap V (2030) menjadi fase puncak, yaitu Perwujudan Pelayanan Publik di Dinas Pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Pada tahap ini, seluruh program penguatan, peningkatan, optimalisasi, dan akselerasi diharapkan bermuara pada terciptanya sistem pelayanan publik yang prima dan mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

Dengan penahapan yang sistematis ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang berkomitmen untuk mewujudkan visi pelayanan publik yang unggul melalui tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan akuntabel.

Tabel 3. 5
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG	KET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1	Urusan Bidang Pendiidkan	Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah	Pemerataan Aksesibilitas pelayanan pendidikan	
		Pemerataan kualitas penyelenggaraan Pendidikan	Pemerataan Aksesibilitas pelayanan pendidikan	
			Penguatan Layanan Pendidikan pada satuan PAUD	
		Penguatan akhlak dan nilai-nilai budaya	Pencegahan perundungan, kekerasan seksual, dan hukuman fisik	

Tabel ini menunjukkan bagaimana arah kebijakan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten dioperasionalkan ke dalam rencana strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang secara sistematis dan terukur. Matriks pada tabel menguraikan benang merah keterkaitan antara Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), arah kebijakan *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)*, hingga turunan kebijakan spesifik pada bidang Pendidikan.

1. Peningkatan Pelayanan Publik yang Efisien, Transparan, dan Responsif

Operasionalisasi NSPK pertama memprioritaskan penguatan pelayanan publik melalui penetapan standar layanan, pemanfaatan teknologi digital, dan pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan. Hal ini kemudian dijabarkan ke dalam arah kebijakan RPJMD berupa:

1. Penetapan standar waktu respon dan mekanisme tindak lanjut,
2. Pengembangan layanan digital untuk aksesibilitas dan efisiensi,
3. Edukasi masyarakat agar mampu memanfaatkan teknologi secara optimal.

Dalam konteks Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, kebijakan ini diformulasikan lebih teknis melalui:

1. Penetapan standar layanan minimal untuk seluruh jenis pelayanan publik,
 2. Penguatan sistem pelayanan berbasis digital (seperti manajemen antrian, pengaduan, dan layanan surat-menyurat),
 3. Edukasi dan sosialisasi layanan digital disertai pelibatan masyarakat dalam survei kepuasan untuk meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik.
2. Penguatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan Kinerja yang Terintegrasi
- Operasionalisasi NSPK kedua diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola perencanaan pembangunan dengan prinsip transparansi, partisipasi, dan sinkronisasi lintas dokumen perencanaan. Kebijakan ini diterjemahkan dalam RPJMD melalui:
1. Peningkatan akuntabilitas berbasis sasaran prioritas,
 2. Perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja,

3. Sinkronisasi dokumen perencanaan pusat, provinsi, dan kabupaten.

Di tingkat Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, kebijakan ini dijabarkan dalam tindakan nyata, antara lain:

1. Penerapan pengukuran kinerja berbasis output yang terhubung dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Zona Integritas,
2. Penguatan perencanaan partisipatif di sekolah sebagai input dokumen Dinas Pendidikan,
3. Pelaporan kinerja secara terbuka melalui Musrenbang Dinas Pendidikan dan media publik,
4. Sinkronisasi kegiatan dengan arah kebijakan pendidikan yang relevan.

3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Sebagai penutup, dokumen ini juga menekankan perlunya meningkatkan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam keseluruhan siklus kebijakan. Implementasinya di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang diterjemahkan melalui:

- Peningkatan kualitas pelibatan masyarakat lewat forum dialog, konsultasi publik, serta peningkatan kapasitas aparatur untuk merespons aspirasi masyarakat dengan baik.

Secara keseluruhan, matriks operasionalisasi ini menunjukkan adanya konsistensi antara kebijakan nasional dan daerah dengan rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Arah kebijakan yang disusun berfokus pada:

1. Peningkatan pelayanan publik berbasis standar yang jelas, teknologi digital, dan akuntabilitas,
2. Tata kelola pemerintahan yang terintegrasi, partisipatif, dan akuntabel,
3. Partisipasi masyarakat yang aktif sebagai wujud penguatan *good governance* di bidang Pendidikan.

Pendekatan ini diharapkan mampu mendukung terwujudnya Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang yang adaptif, transparan, serta responsif terhadap kebutuhan dan dinamika masyarakat di era digital dan desentralisasi pembangunan daerah.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program dan kegiatan Perangkat Daerah serta pendanaan daerah merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program/kegiatan dan sub kegiatan. Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dan kegiatan dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk perencanaan operasional. Dalam hal program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Hal ini karena urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi, yang selanjutnya disebut dengan program/kegiatan pembangunan daerah. Program/kegiatan baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah.

Seiring dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 maka Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 telah dilakukan penyusunan program prioritas pembangunan dan arah kebijakan daerah dengan kebijakan Pusat dan Daerah sesuai yang tertuang dalam dokumen RPJMN dan RPJMD, hal ini dilakukan dalam rangka mendukung program-program prioritas nasional di daerah. Pada akhirnya, dilakukan penyesuaian dan penyelarasan terhadap Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029.

4.1. Teknik Merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang

Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029 dilakukan melalui pendekatan yang sistematis, partisipatif, dan berbasis pada analisis permasalahan serta potensi yang dimiliki Dinas Pendidikan. Proses ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan, khususnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, serta mengintegrasikan dokumen perencanaan daerah lainnya seperti RPJPD, RPJMD, dan Renstra Perangkat Daerah terkait.

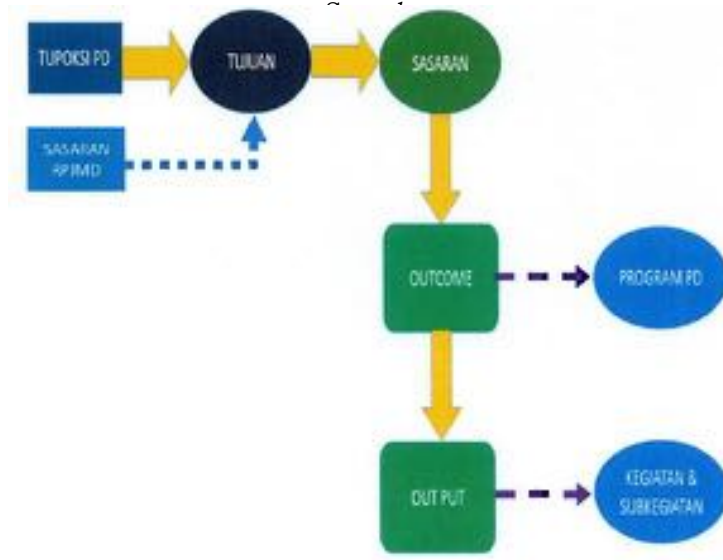
Langkah pertama adalah identifikasi kebutuhan dan permasalahan berdasarkan evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya, analisis indikator pelayanan publik, serta masukan dari pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik, musrenbang Dinas Pendidikan, dan koordinasi lintas sektor. Tahap ini memastikan bahwa perumusan program benar-benar menjawab isu strategis yang telah ditetapkan, yaitu *pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif*.

Selanjutnya dilakukan penyelarasan prioritas program dengan arah kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten, termasuk integrasi agenda global seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Penyelarasan ini menjamin relevansi dan kesinambungan program Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang dalam mendukung target pembangunan daerah.

Perumusan kegiatan dan sub kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Setiap kegiatan dirancang memiliki indikator kinerja yang jelas, target terukur, sumber pembiayaan yang realistis, serta rencana pelaksanaan yang dapat dimonitor dan dievaluasi secara periodik.

Dengan teknik ini, diharapkan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang selama periode 2025–2029 tidak hanya mampu meningkatkan kinerja pelayanan publik, tetapi juga memberdayakan masyarakat, menjaga ketentraman dan ketertiban umum, serta memperkuat koordinasi dengan Sekolah.

Gambar 4. 1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten



Kerangka perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang disusun untuk memastikan adanya keterkaitan yang logis dan sistematis antara tugas pokok dan fungsi perangkat daerah (Tupoksi PD) dengan hasil pembangunan yang ingin dicapai.

Diagram pada Gambar 4.1 menunjukkan bahwa proses perumusan dimulai dari Tupoksi PD serta sasaran RPJMD yang menjadi landasan utama. Dari dasar ini, dirumuskan tujuan yang akan dicapai selama periode perencanaan. Tujuan ini kemudian diturunkan menjadi sasaran, yang bersifat lebih spesifik dan terukur, sehingga memudahkan dalam pengendalian dan evaluasi.

Sasaran tersebut diarahkan untuk menghasilkan outcome, yakni dampak nyata yang diharapkan dari pelaksanaan program. Outcome menjadi titik hubung yang krusial karena dari sini ditentukan program perangkat daerah yang relevan dan mendukung pencapaian sasaran strategis.

Program perangkat daerah kemudian diuraikan lebih lanjut menjadi kegiatan dan sub kegiatan, yang menghasilkan output

sebagai produk atau layanan yang secara langsung diterima masyarakat. Hubungan antara outcome dan output menggambarkan kesinambungan logis antara dampak pembangunan dengan hasil konkret di lapangan.

Alur ini juga menunjukkan adanya penyelarasan vertikal antara dokumen perencanaan tingkat daerah dengan perencanaan di bidang Pendidikan, sehingga setiap program dan kegiatan tidak hanya relevan dengan kondisi lokal, tetapi juga konsisten dengan prioritas pembangunan kabupaten, provinsi, dan nasional.

Dengan kerangka ini, proses perumusan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang menjadi lebih terarah, fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, serta mampu menjawab isu strategis utama yaitu *pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif*.

Tabel 4. 1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
(Berikan keterangan di sub kegiatan mendukung SPM, IKK, Program Unggulan atau ketiga-tiganya)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDUKTOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU BERWAKTU TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2025	2025	2025	2025	2025	2027	2027	2028	2028	2029	2029	2030	2030	2030	2030
1.01 - URAIAN/REVISI/DAFTAR REVISI PERENCANAAN				736.111.967,410		746.027.962.448,43		747.138.290.579,76		866.019.290.911,23		824.479.746.942,4		
1.01.01 - DOUGGAL PESEKUNJO URUSAN PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG				389.807.075,897		422.972.543.892,43		506.522.821.923,76		566.987.761.645,23		666.171.235.935,6		
Meningkatkan stabilitas kinerja Perangkat Daerah	Misi Satpa Perangkat Daerah (MSPD)	80,80	91,6	389.807.075,897	92	422.972.543.892,43	92,6	506.522.821.923,76	93	566.987.761.645,23	93,6	666.171.235.935,6	1.01.01.01.01.01 02 - Dinas Pendidikan	
1.01.01.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				236.280.000		206.019.000		226.019.000		246.075.790		246.083.968		
Terdapatnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah Data Statistik Sekeloa Daerah yang telah dikumpulkan dan Diarsipkan (jumlah Perangkat Daerah (Data)	1	1	236.280.000	1	206.019.000	1	226.019.000	1	246.075.790	1	246.083.968		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen DPA, SPDP dan Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan (Dokumen DPA, SPDP Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berkeadilan Daerah (Jumlah yang Diarsipkan dalam Kegiatan Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Berkeadilan)		1								1			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA, SPDP dan Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Dokumen Perubahan DPA, SPDP (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RBA, SPDP dan Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Dokumen Perubahan RBA, SPDP (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RBA, SPDP dan Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan (Dokumen RBA, SPDP Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Misi/Visi/Rencana Kerja (SPDP dan Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan) Laporan Capaian Kinerja dan Misi/Visi/Rencana Kerja (SPDP) Laporan Koordinasi	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Usaha Tahunan Rencana PTG dan Rencana PTG yang Diserikan (Dokumen)		2		2		2		2		2			
1.01.01.01.001 - Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				43.390.000		46.240.000		53.119.000		56.420.000		66.273.968		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBSEKSIAN OUTPUT	INDUKTOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2014	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2015		2017		2018		2019		2020			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Terdapatnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	43.950.000	2	48.280.000	2	53.110.000	2	58.430.000	2	63.270.000		
1201312301002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				12.780.000		14.080.000		15.470.000		17.020.000		18.730.000		
Terdapatnya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	12.780.000	1	14.080.000	1	15.470.000		17.020.000	1	18.730.000		
1201312301003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.900.000		2.160.000		2.460.000		2.810.000		3.200.000		
Terdapatnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.900.000	1	2.160.000	1	2.460.000	1	2.810.000	1	3.200.000		
1201312301004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				4.100.000		4.710.000		5.360.000		6.070.000		6.830.000		
Terdapatnya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	4.100.000	1	4.710.000	1	5.360.000	1	6.070.000	1	6.830.000		
1201312301005 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1.300.000		1.500.000		1.740.000		2.020.000		2.340.000		
Terdapatnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.300.000	1	1.500.000	1	1.740.000	1	2.020.000	1	2.340.000		
1201312301006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Mitras Realisasi Kinerja SKPD				52.300.000		58.030.000		64.480.000		71.840.000		79.790.000		
Terdapatnya Laporan Capaian Kinerja dan Mitras Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Mitras Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Mitras Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Mitras Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	52.300.000	1	58.030.000	1	64.480.000	1	71.840.000	1	79.790.000		
1201312301008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sekeloa Daerah				26.000.000		27.000.000		28.250.000		29.770.000		31.460.000		
Terdapatnya Pengumpulan Data Statistik Sekeloa Daerah	Jumlah Data Statistik Sekeloa Daerah yang telah dikumpulkan dan Diinput ke dalam Perangkat Daerah (Data)	1	1	26.000.000	1	27.000.000	1	28.250.000	1	29.770.000	1	31.460.000		
1201312301010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Dampak dalam Rangka Pengumpulan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				50.000.000		0		0		0		70.000.000		
Terdapatnya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Dampak dalam Rangka Pengumpulan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Dampak dalam Rangka Pengumpulan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1	50.000.000	1	0	0	0	0	0	1	70.000.000		
1201312301011 - Pelaksanaan Dokumen Perencanaan Urusan Sektor Kesehatan PD dan Rangka PD				0.000.000		0.000.000		0.000.000		0.000.000		40.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKELOMPOK OUTPUT	INDUKTOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2014	TARGET DAN PASU INDIKATOR TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2015		2017		2018		2019		2020			
			TARGET	PASU	TARGET	PASU	TARGET	PASU	TARGET	PASU	TARGET	PASU		
2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
Terdapatnya Dokumen Perencanaan Utusan Tahunan Persepsi/PO dan Rangka PO	Jumlah Dokumen Perencanaan Utusan Tahunan Persepsi/PO dan Rangka PO yang dibuat (Dokumen)		2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000		
1.01.01.2.01 - Administrasi Keuangan Daerah				488.130.302.217		510.091.884.772.43		523.389.776.891.74		536.467.401.214.03		549.989.015.346.38		
Terdapatnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	488.130.302.217	1	510.091.884.772.43	1	523.389.776.891.74	1	536.467.401.214.03	1	549.989.015.346.38		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Pencapaian Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Melakukan dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	0.621	0.621		0.621		0.621		0.621		0.621			
1.01.01.2.02.001 - Persiapan Gap dan Tunjangan ASN				488.095.302.217		510.047.884.772.43		523.311.376.891.74		536.394.191.214.03		549.959.015.346.38		
Terdapatnya Gap dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Melakukan dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	0.621	0.621	488.095.302.217	0.621	510.047.884.772.43	0.621	523.311.376.891.74	0.621	536.394.191.214.03	0.621	549.959.015.346.38		
1.01.01.2.02.001 - Pelaksanaan Pembekukan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD				20.000.000		22.000.000		24.200.000		26.420.000		28.262.000		
Terdapatnya Pelaksanaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	20.000.000	1	22.000.000	1	24.200.000	1	26.420.000	1	28.262.000		
1.01.01.2.02.002 - Koordinasi dan Pencapaian Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				20.000.000		22.000.000		24.200.000		26.420.000		28.262.000		
Terdapatnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Pencapaian Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Pencapaian Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	20.000.000	1	22.000.000	1	24.200.000	1	26.420.000	1	28.262.000		
1.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah				95.000.000		77.000.000		84.700.000		93.170.000		102.447.000		
Terdapatnya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Pelaksanaan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	95.000.000	1	77.000.000	1	84.700.000	1	93.170.000	1	102.447.000		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pencapaian Laporan Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pengawasan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1												
1.01.01.2.03.001 - Pelaksanaan Pencapaian Pelaksanaan Barang Milik Daerah SKPD				20.000.000		22.000.000		24.200.000		26.420.000		28.262.000		
Terdapatnya Rencana Pelaksanaan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Jumlah Rencana Pelaksanaan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	20.000.000	1	22.000.000	1	24.200.000	1	26.420.000	1	28.262.000		
1.01.01.2.03.002 - Pengawasan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBSEKSIAN OUTPUT	INDUKTOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2014	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2015		2017		2018		2019		2020			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	
Tindak lanjut Pengamatan Rasio Misi Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamatan Rasio Misi Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		
120101200000 - Reformasi dan Penguatan Lapisan Berang Misi Daerah pada SKPD				25.000.000		27.000.000		30.250.000		33.275.000		36.402.500		
Tindak lanjut Reformasi dan Penguatan Lapisan Berang Misi Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Reformasi dan Penguatan Lapisan Berang Misi Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	25.000.000	1	27.000.000	1	30.250.000	1	33.275.000	1	36.402.500		
120101200000 - Penguatan Berang Misi Daerah pada SKPD				25.000.000		27.000.000		30.250.000		33.275.000		36.402.500		
Tindak lanjut Penguatan Berang Misi Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penguatan Berang Misi Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	25.000.000	1	27.000.000	1	30.250.000	1	33.275.000	1	36.402.500		
120101200000 - Administrasi dan Pengembangan Perangkat Daerah				425.000.000		467.000.000		514.250.000		565.675.000		622.342.500		
Meningkatkan Indeks Pefektifitas Misi Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (Orang)	100	100	425.000.000	100	467.000.000	100	514.250.000	100	565.675.000	100	622.342.500		
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pejabat (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penilaian dan Pengukuran Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Kerangka Kerja Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Orang)	754	754		754		754		754		754			
	Jumlah Paket Paket Dasar Jawab Akad Keagamaan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Pegawai/Petani yang Dibekalkan (Orang)	10	10		10		10		10		10			
120101200000 - Penguatan Pakan Dasar Jawab Akad Keagamaan				600.000.000		610.000.000		621.000.000		632.100.000		643.410.000		
Tindak lanjut Pakan Dasar Jawab Akad Keagamaan	Jumlah Paket Paket Dasar Jawab Akad Keagamaan (Paket)	1	1	600.000.000	1	610.000.000	1	621.000.000	1	632.100.000	1	643.410.000		
120101200000 - Penguatan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian				25.000.000		27.000.000		30.250.000		33.275.000		36.402.500		
Tindak lanjut Penguatan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Penguatan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	25.000.000	1	27.000.000	1	30.250.000	1	33.275.000	1	36.402.500		
120101200000 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				25.000.000		27.000.000		30.250.000		33.275.000		36.402.500		
Tindak lanjut Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	25.000.000	1	27.000.000	1	30.250.000	1	33.275.000	1	36.402.500		
120101200000 - Penguatan Pegawai yang Pensiun				25.000.000		27.000.000		30.250.000		33.275.000		36.402.500		
Tindak lanjut Penguatan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai/Petani yang Dibekalkan (Orang)	10	10	25.000.000	10	27.000.000	10	30.250.000	10	33.275.000	10	36.402.500		
120101200000 - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan				600.000.000		610.000.000		621.000.000		632.100.000		643.410.000		
Tindak lanjut Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (Orang)	100	100	600.000.000	100	610.000.000	100	621.000.000	100	632.100.000	100	643.410.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKELOMPOK OUTPUT	INDUKTOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2014	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2015		2017		2018		2019		2020			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12010120101 - Bidang Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		200.000.000		
Terdapatnya Bidang Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	734	734	100.000.000	734	100.000.000	734	100.000.000	734	100.000.000	734	200.000.000		
12010120102 - Administrasi Umum Perangka Daerah				400.000.000		400.000.000		544.000.000		596.000.000		658.000.000		
Terdapatnya Pengambilan Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Teknik dan Peralengkapan yang Dihasilkan (Paket)	1	1	400.000.000	1	400.000.000	1	544.000.000	1	596.000.000	1	658.000.000		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dihasilkan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Kebijakan Pelayanan Publik yang Dihasilkan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan-Bahan dan Peralatan Perundang-Undangan yang Dihasilkan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Perakitan Rumah Tangga yang Dihasilkan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Perakitan dan Peralengkapan Kantor yang Dihasilkan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
12010120103 - Penyelenggaraan Perakitan dan Peralengkapan Kantor				900.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		
Terdapatnya Perakitan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Paket Perakitan dan Peralengkapan Kantor yang Dihasilkan (Paket)	1	1	900.000.000	1	110.000.000	1	121.000.000	1	133.100.000	1	146.410.000		
12010120104 - Penyelenggaraan Perakitan Rumah Tangga				60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		75.300.000		
Terdapatnya Perakitan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perakitan Rumah Tangga yang Dihasilkan (Paket)	1	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	75.300.000		
12010120105 - Penyelenggaraan Bahan Logistik Kantor				60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		75.300.000		
Terdapatnya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dihasilkan (Paket)	1	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	75.300.000		
12010120106 - Penyelenggaraan Ruang Teknik dan Peralengkapan				60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		75.300.000		
Terdapatnya Ruang Teknik dan Peralengkapan	Jumlah Paket Ruang Teknik dan Peralengkapan yang Dihasilkan (Paket)	1	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	75.300.000		
12010120107 - Penyelenggaraan Bahan-Bahan dan Peralatan Perundang-Undangan				60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		75.300.000		
Terdapatnya Bahan-Bahan dan Peralatan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan-Bahan dan Peralatan Perundang-Undangan yang Dihasilkan (Dokumen)	1	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	75.300.000		
12010120108 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				900.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBSISTEM OUTPUT	INDUKTOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010
	Jumlah Pembiayaan Dana Operasional atau Lapangan yang Disalurkan dan Disalurkan Pagu dan Personanya (Unit)	0	0		0		0		0		0			
1301012300002 - Pembiayaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pagu dan Personanya Pembiayaan Dana Operasional atau Lapangan				900.000.000		110.000.000		120.000.000		130.000.000		140.000.000		
Terdapatnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pagu dan Personanya Pembiayaan Dana Operasional atau Lapangan	Jumlah Pembiayaan Dana Operasional atau Lapangan yang Disalurkan dan Disalurkan Pagu dan Personanya (Unit)	0	0	900.000.000	0	110.000.000	0	120.000.000	0	130.000.000	0	140.000.000		
1301012300003 - Pembiayaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Terdapatnya Pembiayaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi (Unit)	2	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000		
1301012300004 - PENGADAAN PERLENGKAPAN (PENDANAAN)				220.000.000.000		240.000.000.000		240.000.000.000		260.000.000.000		260.000.000.000		
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar (P12)	99,91	99,99	220.000.000.000	99,91	240.000.000.000	99,99	240.000.000.000	99,97	260.000.000.000	99,99	260.000.000.000	1.010.000.000.000 00 - Dana Pendidikan	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan SMP (P6)	91,99	91,99		91,75		91,99		91,99		91,99			
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan SLTP (P3)	97,91	97,99		97,91		97,99		97,91		97,91			
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan SLTP (P3)	91,9	91,99		91,9		91,99		91,7		91,75			
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan SLTP (P3)	91,9	91,99		91,9		91,99		91,7		91,75			
1301012300005 - Pengadaan Pendidikan Sekolah Dasar				110.000.000.000		110.000.000.000		110.000.000.000		110.000.000.000		110.000.000.000		
Meningkatnya Pengadaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta pendidikan pengajaran di tingkat pendidikan yang dilaksanakan (orang)		814	110.000.000.000	814	110.000.000.000	814	110.000.000.000	814	110.000.000.000	814	110.000.000.000		
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menempati Ruang Peserta Didik (Peserta Didik)	300	300		300		300		300		300			
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menempati Ruang Peserta Didik (Peserta Didik)	400	400		400		400		400		400			
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menempati Ruang Peserta Didik (Peserta Didik)	500	500		500		500		500		500			
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menempati Ruang Peserta Didik (Peserta Didik)	600	600		600		600		600		600			
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menempati Ruang Peserta Didik (Peserta Didik)	700	700		700		700		700		700			
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menempati Ruang Peserta Didik (Peserta Didik)	800	800		800		800		800		800			
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menempati Ruang Peserta Didik (Peserta Didik)	900	900		900		900		900		900			
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menempati Ruang Peserta Didik (Peserta Didik)	1000	1000		1000		1000		1000		1000			
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menempati Ruang Peserta Didik (Peserta Didik)	1100	1100		1100		1100		1100		1100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDUKTOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2014	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PEMERINTAH DAERAH	KETERANGAN
			2015		2017		2018		2019		2020			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
	Jumlah Timbulnya Timbul Kapasitas yang Mendukung Fasilitas Komunitas Pengkutan/Gedung, Pendidikan, Perawatan, Peningkatan Kompetensi dan Kualitas (Orang)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Orang yang Mendukung Peningkatan Penguasaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)		614		614		614		614		614			
	Jumlah Matrik sekolah yang Terselesa (Paket)	100	25		25		25		25		25			
	Jumlah Komunitas Berbasis Pendidikan dan Tenaga Pendidik yang Berkelanjutan (Komunitas)		3		3		3		3		3			
	Jumlah Kegiatan pelatihan dan ad-hoc pelatihan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah kegiatan pembelajaran bagi siswa pendidikan untuk penguasaan penguasaan, keterampilan, dan intelektual (Materi)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring, Penanganan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Dianggap Pustaka (Jumlah Buku)		1.220		1.220		1.220		1.220		1.220			
	Jumlah Rata Rata dan Penguasaan Data yang Terselesa (Paket)	22	6		6		6		6		6			
	Jumlah Peningkatan Sekolah yang Terselesa (Paket)													
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah Ti yang Terselesa (Ruang)	10	3		3		3		3		3			
	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Terselesa (Ruang)	111	8		8		8		8		8			
	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Terselesa (Ruang)	122	16		16		16		16		16			
	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terselesa (Ruang)													
	Jumlah Ruang Jit Koneksi Sekolah yang Terselesa (Ruang)	22	3		3		3		3		3			
	Jumlah Ruang Jit Koneksi Sekolah yang Terselesa (Ruang)	6	3		3		3		3		3			
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah Ti yang Terselesa (Ruang)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Sekolah Peningkatan dan Peningkatan yang Terselesa (Ruang)	10	7		7		7		7		7			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBSEKSIAN OUTPUT	INDUKTOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2014	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TUJUAN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2016		2017		2018		2019		2020			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Jumlah Sekolah Pendidikan yang Menyempatkan Waktu Belajar (Saluran Pendidikan)	508	514		514		514		514		514		514	
	Jumlah Tenaga, Prasarana dan Akses Sekolah yang Telah Dinormalisasi Sekolah (SAS)	24	5		5		5		5		5			
	Jumlah Tenaga Pengajar yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pengajaran (Guru MG) Sekolah (Guru MG)	508	514		514		514		514		514			
	Jumlah Siswa yang Mengikuti Rongga Kompetensi (Rongga Kompetensi dan Non Akademik) (Pusat Data)	40	40		40		40		40		40			
	Jumlah Sekolah Dasar yang Meningkatkan (Guru MG) (Saluran Pendidikan)	508	514		514		514		514		514			
	Jumlah Sekolah Dasar yang Dikelompokkan Perencanaan Kebijakan dan Manajemen sekolah (Saluran Pendidikan)	508	508		508		508		508		508			
	101.02.01.001 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah (R)						500.000.000				500.000.000			
Ruang Guru/Kepala Sekolah (R) yang Terbangan	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah (R) yang Telah Dibangun (Ruang)	3	3	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000		
101.02.01.002 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangan	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	10	5	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000		
101.02.01.003 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	10	3	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000		
101.02.01.004 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Akses Sekolah				1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		
Sarana, Prasarana dan Akses Sekolah yang Terbangan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Akses Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	10	7	1.500.000.000	7	1.500.000.000	7	1.500.000.000	7	1.500.000.000	7	1.500.000.000		
101.02.01.005 - Rehabilitasi Benteng/Benteng Ruang Guru/Kepala Sekolah (R)				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Ruang Guru/Kepala Sekolah (R) yang Tersejahterakan (Ruang/Benteng)	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah (R) yang Telah Dinormalisasi Sekolah (Ruang)	10	5	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000		
101.02.01.006 - Rehabilitasi Benteng/Benteng Ruang Unit Kesehatan Sekolah				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Tersejahterakan (Ruang/Benteng)	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dinormalisasi Sekolah (Ruang/Benteng)	5	3	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000		
101.02.01.007 - Rehabilitasi Benteng/Benteng Perpustakaan Sekolah				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Perpustakaan Sekolah yang Tersejahterakan (Ruang/Benteng)	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dinormalisasi Sekolah (Ruang)	10	5	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000		
101.02.01.008 - Pengadaan Mebel Sekolah				5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKELOMPOK OUTPUT	INDUKTOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2014	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2015		2017		2018		2019		2020			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.01.02.01.001 - Peningkatan Penggunaan Aplikasi Belajar Pendidikan				260.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000		
Teknologi aplikasi penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (orang)		614	260.000.000	614	275.000.000	614	275.000.000	614	275.000.000	614	275.000.000		
1.01.02.01.002 - Koordinasi Pencapaian, Supervisi dan Fungsi Layanan di Bidang Pendidikan				160.000.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000		
Teknologi Koordinasi, Pencapaian, Supervisi dan Fungsi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Tahunan Fasilitasi Pencapaian, Supervisi dan Fungsi Layanan di Bidang Pendidikan (Orang)	1	1	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000		
1.01.02.01.003 - Koordinasi dan Kebijakan Kegiatan Bidang Pendidikan				160.000.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000		
Teknologi kegiatan koordinasi dan kebijaksanaan kegiatan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan koordinasi dan kebijaksanaan kegiatan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1	1	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000		
1.01.02.01.004 - Fasilitas Komunitas Batas Persepsi dan Tenaga Kependidikan				160.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000		
Komunitas Batas Persepsi dan Tenaga Kependidikan yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Batas Persepsi dan Tenaga Kependidikan yang terfasilitasi (Komunitas)		3	160.000.000	3	110.000.000	3	110.000.000	3	110.000.000	3	110.000.000		
1.01.02.01.005 - Peningkatan layanan pendidikan bagi seluruh pendidikan untuk peningkatan penunjang keberhasilan dan keberlanjutan				160.000.000		220.000.000		220.000.000		220.000.000		220.000.000		
Teknologi layanan pendidikan-batas penunjang pendidikan untuk peningkatan penunjang, keberhasilan, dan keberlanjutan	Jumlah kegiatan peningkatan layanan pendidikan untuk peningkatan penunjang, keberhasilan, dan keberlanjutan (Kegiatan)	1	1	160.000.000	1	220.000.000	1	220.000.000	1	220.000.000	1	220.000.000		
1.01.02.01.006 - Peningkatan Dasar Buku Teks dan Non Buku Teks Pemerintah dan Masyarakat				160.000.000		174.400.000		174.400.000		174.400.000		174.400.000		
Penerbitan Buku Teks dan Non Buku Teks Pemerintah dan Masyarakat	Jumlah Buku Teks dan Non Buku Teks yang diterbitkan Pemerintah dan Masyarakat		1.230	160.000.000	1.230	174.400.000	1.230	174.400.000	1.230	174.400.000	1.230	174.400.000		
1.01.02.01.007 - Peningkatan Penerbitan Pemerintah				407.000.000		400.700.000		400.700.000		400.700.000		400.700.000		
Penerbitan Pemerintah	Jumlah Penerbitan Pemerintah yang diterbitkan (Penerbit)		1	407.000.000	1	400.700.000	1	400.700.000	1	400.700.000	1	400.700.000		
1.01.02.01.008 - Peningkatan Buku Teks Baru				1.600.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000		
Buku Teks Baru terbitan	Jumlah Buku Teks Baru yang terbitan (Buku)	171	8	1.600.000.000	8	1.600.000.000	8	1.600.000.000	8	1.600.000.000	8	1.600.000.000		
1.01.02.01.009 - Peningkatan Sistem Informasi, Peningkatan dan Sistem Informasi				1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		
Sistem Informasi dan Sistem Informasi yang terbitan Sistem Informasi	Jumlah Sistem Informasi dan Sistem Informasi yang terbitan Sistem Informasi (Sistem)	30	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000		
1.01.02.01.010 - Peningkatan Sistem Informasi, Sistem Informasi, dan Peningkatan Sistem Informasi				200.000.000		440.000.000		440.000.000		440.000.000		440.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBSEKSIAN OUTPUT	INDUKTOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Terdapatnya Bidang-bidang Teknik, Kesehatan, dan Ilmu Wawasan (TK, Kesehatan, dan Ilmu Wawasan) untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)		408	414	300.000.000	414	440.000.000	414	440.000.000	414	440.000.000	414	440.000.000		
1.01.02.2.01.002 - Pengembangan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				300.000.000		360.000.000		360.000.000		360.000.000		360.000.000		
Terdapatnya arsip/Proses Belajar Bagi Peserta Didik		408	414	300.000.000	414	360.000.000	414	360.000.000	414	360.000.000	414	360.000.000		
1.01.02.2.01.007 - Realisasi Bidang-bidang Ruang Kerja Sekolah				2.121.120.000		2.366.238.500		2.366.238.500		2.366.238.500		2.366.238.500		
Ruang Kerja Sekolah yang Terakreditasi Bidang Realisasi		110	16	2.121.120.000	16	2.366.238.500	16	2.366.238.500	16	2.366.238.500	16	2.366.238.500		
1.01.02.2.01.004 - Peningkatan Ruang Persepsi Peserta Didik Sekolah Dasar				300.000.000		360.000.000		360.000.000		360.000.000		360.000.000		
Ruang Persepsi Peserta Didik Sekolah Dasar (Ruang) dan Peserta Didik		340	300	300.000.000	300	360.000.000	300	360.000.000	300	360.000.000	300	360.000.000		
1.01.02.2.01.005 - Peningkatan Ruang Persepsi Peserta Didik				300.000.000		360.000.000		360.000.000		360.000.000		360.000.000		
Ruang Persepsi dan Peserta Didik yang Terakreditasi		22	5	300.000.000	5	360.000.000	5	360.000.000	5	360.000.000	5	360.000.000		
1.01.02.2.01.006 - Peningkatan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				66.721.640.000		71.874.170.000		72.476.481.000		73.205.017.750		74.058.407.125		
Walaupun ada Peningkatan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		142		66.721.640.000	140	71.874.170.000	140	72.476.481.000	140	73.205.017.750	140	74.058.407.125		
Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Ruang Persepsi Peserta Didik (Peserta Didik)		300	300		300		300		300		300			
Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Ruang Persepsi Peserta Didik yang dilaksanakan (Orang)		7	3		4		4		4		4			
Jumlah Peningkatan Sekolah yang Terakreditasi Bidang Realisasi (Ruang)		5	5		5		5		5		5			
Jumlah Peningkatan Sekolah yang Terakreditasi (Ruang)		5	5		4		4		4		4			
Jumlah Ruang Persepsi dan Peserta Didik yang Terakreditasi (Ruang)		84	20		20		20		20		20			
Jumlah Ruang Persepsi dan Peserta Didik yang Terakreditasi (Ruang)		806			806		806		806		806			
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pemantauan, Tindakan dan Evaluasi Laporan di Bidang Pendidikan (Dokumen)		1	1		1		1		1		1			
Jumlah kegiatan pengembangan bagi seluruh pendidikan untuk peningkatan pendidikan, kesehatan, dan lingkungan (Wawasan)			1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDUKTOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2014	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PEMERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2016		2017		2018		2019		2020			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	
	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan pelatihan kepada Masyarakat (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Komunitas Belajar (Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terlatih (Masyarakat)		5		5		5		5		5			
	Jumlah Laboratorium yang Sehat (Guru/kepala Sekolah/Desa (Ruang)	10	10		4		4		4		4			
	Jumlah Mutu Sekolah yang terwujud (Paket)	100	50		50		50		50		50			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mengikuti Pelatihan Keahlian	50	50		50		50		50		50			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Terampil pada Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Ruang)	150	150		50		50		50		50			
	Jumlah Peningkatan Peningkatan yang Terwujud (Paket)													
	Jumlah Tenaga yang Berprestasi Akademik dalam Peningkatan Data BOS Sekolah Menengah Pertama (Ruang)	127	127		127		127		127		127			
	Jumlah Siswa yang Mengikuti Kegiatan Literasi Masyarakat dan (Desa Akademik) (Peningkatan)	50	50		50		50		50		50			
	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengikuti Data BOS (Sekolah Pendidikan)	128	128		128		128		128		128			
	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Meningkatkan Peningkatan (Sekolah Pendidikan)	128	128		128		128		128		128			
	Jumlah Siswa, Mahasiswa dan Tenaga Pendidik yang Terlatih (Guru/kepala Sekolah/Desa (Ruang)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Siswa, Mahasiswa dan Tenaga Pendidik yang Terlatih (Masyarakat (Ruang)	10	5		5		5		5		5			
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Sehat (Guru/kepala Sekolah/Desa Akademik)	2	1		4		4		4		4			
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Sehat (Ruang)	4	1		4		4		4		4			
	Jumlah Ruang Laboratorium yang Sehat (Ruang (Ruang)	10	10		4		4		4		4			
	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Sehat (Guru/kepala Sekolah/Desa Akademik)	50	50		50		50		50		50			
	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Berfungsi (Ruang)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah yang Sehat (Guru/kepala Sekolah/Desa Akademik)	10	10		10		10		10		10			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKELOMUTAN OUTPUT	INDUKTOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2014	TARGET DAN PASU INDIKATOR TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2015		2017		2018		2019		2020			
			TARGET	PASU	TARGET	PASU	TARGET	PASU	TARGET	PASU	TARGET	PASU		
2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TK yang Terakreditasi (Ruang)	5	3		4		4		5		6			
	Jumlah peserta pelatihan pengajaran aktif di dalam pendidikan yang dilaksanakan (orang)		128				128				128			128
	Jumlah Peserta GMR yang Mengikuti Proses Belajar (Sesuai Penilaian)		128				128				128			128
1.01.02.1.02.003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TK				800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TK yang Terakreditasi	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TK yang Terakreditasi (Ruang)	5	3	800.000.000	4	800.000.000	4	800.000.000	5	800.000.000	6	800.000.000		
1.01.02.1.02.004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terakreditasi	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terakreditasi (Ruang)	4	3	800.000.000	4	800.000.000	4	800.000.000	5	800.000.000	6	800.000.000		
1.01.02.1.02.005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah				800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		
Perpustakaan Sekolah yang Terakreditasi	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Terakreditasi (Ruang)	5	3	800.000.000	4	800.000.000	4	800.000.000	5	800.000.000	6	800.000.000		
1.01.02.1.02.006 - Pembangunan Laboratorium				800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		
Ruang Laboratorium yang Terakreditasi	Jumlah Ruang Laboratorium yang Terakreditasi (Ruang)	10	3	800.000.000	4	800.000.000	4	800.000.000	5	800.000.000	6	800.000.000		
1.01.02.1.02.007 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terakreditasi	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terakreditasi (Ruang)	20	5	1.100.000.000	6	1.100.000.000	6	1.100.000.000	6	1.100.000.000	6	1.100.000.000		
1.01.02.1.02.008 - Rehabilitasi Gedung/Benteng Ruang Rata Sekolah				2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		
Ruang Rata Sekolah yang Terakreditasi Gedung/Benteng	Jumlah Ruang Rata Sekolah yang Terakreditasi Gedung/Benteng (Ruang)	80	10	2.000.000.000	10	2.000.000.000	10	2.000.000.000	10	2.000.000.000	10	2.000.000.000		
1.01.02.1.02.009 - Rehabilitasi Gedung/Benteng Ruang Unit Kesehatan Sekolah				800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terakreditasi Gedung/Benteng	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terakreditasi Gedung/Benteng (Ruang)	2	3	800.000.000	4	800.000.000	4	800.000.000	5	800.000.000	6	800.000.000		
1.01.02.1.02.010 - Rehabilitasi Gedung/Benteng Perpustakaan Sekolah				800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		
Perpustakaan Sekolah yang Terakreditasi Gedung/Benteng	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Terakreditasi Gedung/Benteng (Ruang)	1	2	800.000.000	4	800.000.000	4	800.000.000	5	800.000.000	6	800.000.000		
1.01.02.1.02.011 - Rehabilitasi Gedung/Benteng Laboratorium				800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		
Laboratorium yang Terakreditasi Gedung/Benteng	Jumlah Laboratorium yang Terakreditasi Gedung/Benteng (Ruang)	10	5	800.000.000	6	800.000.000	6	800.000.000	6	800.000.000	6	800.000.000		
1.01.02.1.02.012 - Rehabilitasi Gedung/Benteng Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				900.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBSEKSIAN OUTPUT	INDUKTOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
Tarima, Pemenuhan dan Ujikan Sekolah yang Terakreditasi Sedang/Berat	Jumlah Tarima, Pemenuhan dan Ujikan Sekolah yang Terakreditasi Sedang/Berat (TAU)	5	5	900.000.000	5	900.000.000	5	900.000.000	5	900.000.000	5	900.000.000		
1.01.02.1.01.001 - Penguatan Model Sekolah				1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		
Bekal Sekolah yang Tersedia	Jumlah Bekal Sekolah yang Tersedia (Pusat)	100	50	1.000.000.000	50	1.000.000.000	50	1.000.000.000	50	1.000.000.000	50	1.000.000.000		
1.01.02.1.01.002 - Penguatan Peningkatan Sekolah				602.400.000		112.040.000		112.040.000		112.040.000		112.040.000		
Peningkatan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Peningkatan Sekolah yang Tersedia (Pusat)	5	5	602.400.000	5	112.040.000	5	112.040.000	5	112.040.000	5	112.040.000		
1.01.02.1.01.003 - Penguatan Rasio Personel Pemenuhan Sekolah Menengah Pertama				200.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Rasio Personel Pemenuhan Sekolah Menengah Pertama yang Memenuhi Rasio Personel Pemenuhan Sekolah (Dulu)	Jumlah Personel Pemenuhan Sekolah Menengah Pertama yang Memenuhi Rasio Personel Pemenuhan Sekolah (Dulu)	142		200.000.000	140	100.000.000	140	100.000.000	140	100.000.000	140	100.000.000		
1.01.02.1.01.004 - Penguatan Model Bekal dan Keaktifan Guru				300.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Time yang Mengikuti Ajaran Kompetitif/Lintas Akademik dan Non-Akademik	Jumlah Time yang Mengikuti Ajaran Kompetitif/Lintas Akademik dan Non-Akademik (Pusat)	40	40	300.000.000	40	100.000.000	40	100.000.000	40	100.000.000	40	100.000.000		
1.01.02.1.01.005 - Penguatan Peningkatan dan Tenaga Keperawatan yang Tersedia Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				600.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000		
Pendidik dan Tenaga Keperawatan yang Tersedia yang Tersedia Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Keperawatan yang Tersedia yang Tersedia Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Dulu)	100	100	600.000.000	100	110.000.000	100	110.000.000	100	110.000.000	100	110.000.000		
1.01.02.1.01.006 - Pengembangan Kari Pendidik dan Tenaga Keperawatan yang Tersedia Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				200.000.000		275.000.000		302.500.000		332.750.000		360.000.000		
Pendidik dan Tenaga Keperawatan yang Tersedia yang Tersedia Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Keperawatan yang Tersedia yang Tersedia Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Dulu)	50	50	200.000.000	50	275.000.000	50	302.500.000	50	332.750.000	50	360.000.000		
1.01.02.1.01.007 - Penguatan Keperawatan dan Manajemen Sekolah				600.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Teknik Keperawatan Keperawatan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Teknik Keperawatan Keperawatan dan Manajemen Sekolah (Dulu)	120	120	600.000.000	120	100.000.000	120	100.000.000	120	100.000.000	120	100.000.000		
1.01.02.1.01.008 - Penguatan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				40.000.000.000		40.000.000.000		40.000.000.000		40.000.000.000		40.000.000.000		
Teknik Keperawatan Keperawatan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Teknik Keperawatan Keperawatan dan Manajemen Sekolah (Dulu)	120	120	40.000.000.000	120	40.000.000.000	120	40.000.000.000	120	40.000.000.000	120	40.000.000.000		
1.01.02.1.01.009 - Penguatan Keperawatan Keperawatan dan Manajemen Sekolah				600.000.000		275.000.000		302.500.000		332.750.000		360.000.000		
Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Tersedia dengan Baik	Jumlah Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Tersedia dengan Baik (Dulu)	120	120	600.000.000	120	275.000.000	120	302.500.000	120	332.750.000	120	360.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKELOMPOK OUTPUT	INDUKTOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2014	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2015		2017		2018		2019		2020			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
015	015	015	016	017	017	018	018	019	019	020	020	021	016	016
1.01.02.1.02.0001 - Peningkatan Penggunaan Aplikasi Belajar Pendidikan				900.000.000		200.000.000		340.000.000		386.380.000		280.000.000		
Tak tercapainya indikator penggunaan aplikasi di tingkat pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di tingkat pendidikan yang dilaksanakan (orang)		128	900.000.000	128	200.000.000	128	340.000.000	128	386.380.000	128	280.000.000		
1.01.02.1.02.0001 - Koordinasi Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				900.000.000		200.000.000		340.000.000		386.380.000		280.000.000		
Tak tercapainya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Tahunan Final Koordinasi Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Orang-tahun)	1	1	900.000.000	1	200.000.000	1	340.000.000	1	386.380.000	1	280.000.000		
1.01.02.1.02.0002 - Koordinasi dan Alokasi Kegiatan Belajar Pendidikan				900.000.000		200.000.000		340.000.000		386.380.000		280.000.000		
Tak tercapainya kegiatan koordinasi dan alokasi kegiatan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan koordinasi dan alokasi kegiatan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang-tahun)	1	1	900.000.000	1	200.000.000	1	340.000.000	1	386.380.000	1	280.000.000		
1.01.02.1.02.0002 - Fasilitas Komunitas Belajar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan				900.000.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000		
Komunitas Belajar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidikan dan Tenaga Pendidikan yang terfasilitasi (Komunitas)	0	0	900.000.000	0	160.000.000	0	160.000.000	0	160.000.000	0	160.000.000		
1.01.02.1.02.0002 - Peningkatan layanan pendidikan bagi seluruh pendidikan umum, dan menengah keatas, dan menengah kebawah				900.000.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000		
Tak tercapainya seluruh pendidikan-fasilitas pendidikan-peningkatan, menengah, dan menengah	Jumlah kegiatan peningkatan bagi seluruh pendidikan untuk peningkatan-peningkatan, menengah, dan menengah (Rangkaian)	1	1	900.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000		
1.01.02.1.02.0008 - Peningkatan Proses Belajar bagi Peserta Didik				900.000.000		270.000.000		300.000.000		332.750.000		366.000.000		
Tak tercapainya proses belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Jumlah Pendidikan)		128	900.000.000	128	270.000.000	128	300.000.000	108	332.750.000	128	366.000.000		
1.01.02.1.02.0008 - Peningkatan Ruang Belajar Baru				1.400.000.000		1.100.000.000		1.210.000.000		1.321.000.000		1.434.000.000		
Ruang Belajar Baru Berfungsi	Jumlah Ruang Belajar Baru yang Berfungsi (Ruang)	14	14	1.000.000.000	14	1.100.000.000	14	1.210.000.000	14	1.321.000.000	14	1.434.000.000		
1.01.02.1.02.0008 - Meningkatkan Pelayanan, dan atau Rampingan, untuk Peningkatan Kapasitas Belajar Pendidikan				300.000.000		386.000.000		423.500.000		460.880.000		500.000.000		
Tak tercapainya Meningkatkan Pelayanan, dan atau Rampingan, untuk Peningkatan Kapasitas Belajar Pendidikan	Jumlah Peserta Meningkatkan Pelayanan, dan atau Rampingan, untuk Peningkatan Kapasitas Belajar Pendidikan yang dilaksanakan (orang)	300	300	300.000.000	300	386.000.000	300	423.500.000	300	460.880.000	300	500.000.000		
1.01.02.1.02.0001 - Peningkatan Daya Siswa Baru dan Non Baru Peserta Didik				100.000.000		100.000.000		146.361.000		160.000.000		177.000.000		
Peserta Didik Menambah Peningkatan Daya Siswa Baru dan Non Baru	Jumlah Siswa Baru dan Non Baru yang Ditambah Peserta Didik (Siswa)	800	800	100.000.000	800	100.000.000	800	146.361.000	800	160.000.000	800	177.000.000		
1.01.02.1.02.0002 - Peningkatan Peningkatan Peserta Didik				0		0		0		0		0		

[illegible]

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBSEKSIAN OUTPUT	INDUKTOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2014	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2016		2017		2018		2019		2020			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Menempatkan Fasilitas Koneksi Pengikut/Golongan, Pendidikan, Pemas, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Orang	300	300		300		300		300		300			
	Jumlah PKU yang Mengirim Data RSP (Salah Perhitungan)	500												
	Jumlah PKU yang Menentukan Peningkatan Pendidikan dan Masyarakat (Salah Perhitungan)	500	500		500		500		500		500			
	Jumlah Matrik PKU yang Terseksi (Paket)		5		5		5		5		5			
	Jumlah Komunitas Belajar Persepsi dan Tenaga Pendidik yang berkolaborasi (Komunitas)		1		1		1		1		1			
	Jumlah kegiatan pelatihan dan akademi terapan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah kegiatan pelatihan yang satu kali pendidikan untuk perguruan menengah, akademi, dan pelatihan Karyawan		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Laporan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah RSP yang Terseksi Pemerintah Data PKU yang Terseksi (Paket)	5	5		5		5		5		5			
130120303003 - Peningkatan Sarana, Prasarana dan LKMS PKU				1.000.000.000		1.100.000.000		1.210.000.000		1.331.000.000		1.464.100.000		
Sarana, Prasarana dan LKMS PKU yang Terseksi	Jumlah Sarana, Prasarana dan LKMS PKU yang Terseksi (Unit)	5	5	1.000.000.000	5	1.100.000.000	5	1.210.000.000	5	1.331.000.000	5	1.464.100.000		
130120303007 - Peningkatan Materi				500.000.000		550.000.000		605.000.000		660.500.000		717.050.000		
Materi PKU yang Terseksi	Jumlah Materi PKU yang Terseksi (Paket)	5	5	500.000.000	5	550.000.000	5	605.000.000	5	660.500.000	5	717.050.000		
130120303008 - Peningkatan Peningkatan PKU				5		5		5		5		5		
Peningkatan PKU yang Terseksi	Jumlah peningkatan PKU yang Terseksi (Paket)			5		5		5		5		5		
130120303011 - Peningkatan Biaya Bantuan Pemerintah Data PKU				200.000.000		215.000.000		231.000.000		247.500.000		265.500.000		
Biaya Bantuan Pemerintah Data PKU Gubernur dan Pemerintah Daerah	Jumlah Biaya Bantuan Pemerintah Data PKU yang Terseksi (Unit)	500	500	200.000.000	500	215.000.000	500	231.000.000	500	247.500.000	500	265.500.000		
130120303015 - Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Terseksi PKU				400.000.000		428.000.000		457.000.000		487.000.000		518.000.000		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terseksi yang PKU	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Terseksi pada Materi (Guru)		100	400.000.000	100	428.000.000	100	457.000.000	100	487.000.000	100	518.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKELOMUTAN OUTPUT	INDUKTOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2025	2027	2028	2029	2030	2025	2027	2028	2029	2030	2025	2027	2028	2029	2030
1201021000000 - Pengembangan Ker. Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada Sektor Pendidikan PAUD				500.000.000		200.000.000		240.000.000		280.000.000		280.000.000		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kebutuhan Pengembangan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kebutuhan Pengembangan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (orang)	000	000	500.000.000	000	200.000.000	000	240.000.000	000	280.000.000	000	280.000.000		
1201021000001 - Peningkatan Keterampilan dan Manajemen PAUD				300.000.000		100.000.000		300.000.000		100.000.000		400.000.000		
Teknis/kegiatan Peningkatan Keterampilan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Mendapatkan Peningkatan Keterampilan dan Manajemen (Sektor Pendidikan)	000	000	300.000.000	000	100.000.000	000	300.000.000	000	100.000.000	000	400.000.000		
1201021000002 - Peningkatan Dana BOP PAUD				10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		
Teknis/kegiatan Peningkatan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mendapatkan Dana BOP (Sektor Pendidikan)	000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		
1201021000003 - Peningkatan Kapasitas Peningkatan Dana BOP PAUD				300.000.000		200.000.000		240.000.000		280.000.000		280.000.000		
Meningkatkan Kapasitas Peningkatan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitas dalam Peningkatan Dana BOP PAUD (orang)	000	000	300.000.000	000	200.000.000	000	240.000.000	000	280.000.000	000	280.000.000		
1201021000004 - Fasilitas Penggunaan Aplikasi Belajar Pendidikan				0		0		0		0		0		
Teknis/kegiatan fasilitas penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (orang)			0		0		0		0		0		
1201021000005 - Koordinasi Pemerintahan, Supremasi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				600.000.000		200.000.000		240.000.000		280.000.000		280.000.000		
Teknis/kegiatan Koordinasi, Pemerintahan, Supremasi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pemerintahan, Supremasi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	1	600.000.000	1	200.000.000	1	240.000.000	1	280.000.000	1	280.000.000		
1201021000006 - Sistemisasi Aplikasi Manajemen Belajar Pendidikan				600.000.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000		200.000.000		
Teknis/kegiatan kegiatan sistemisasi dan aplikasi manajemen di bidang Pendidikan (Dokumen)	Jumlah kegiatan sistemisasi dan aplikasi manajemen di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1	600.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	1	200.000.000		
1201021000007 - Peningkatan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TK				0		0		0		0		0		
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TK yang terbentuk	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TK yang Terbentuk (Ruang)			0		0		0		0		0		
1201021000008 - Fasilitas Komunitas Sektor Pendidikan dan Tenaga Kependidikan				600.000.000		200.000.000		240.000.000		280.000.000		280.000.000		
Komunitas Sektor Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang terbentuk	Jumlah Komunitas Sektor Pendidikan dan Tenaga Pendidik yang terbentuk (komunitas)	1	1	600.000.000	1	200.000.000	1	240.000.000	1	280.000.000	1	280.000.000		
1201021000009 - Peningkatan Ruang Kelas Baru				0		0		0		0		0		
Ruang Kelas Baru terbentuk	Jumlah Ruang Kelas Baru yang terbentuk (Ruang)			0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKELOMPOK OUTPUT	INDUKTOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2014	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2015		2017		2018		2019		2020			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.01.02.1.01.001 - Peningkatan Minat Bakat dan Prestasi Peserta Didik				900.000.000		275.000.000		800.000.000		552.750.000		900.000.000		
Peserta Didik yang Mengikuti Kompetisi Lomba Nasional dan Internasional	Unitas Peserta Didik yang Mengikuti Kompetisi Lomba Nasional dan Internasional (Peserta Didik)		20	900.000.000	30	275.000.000	30	800.000.000	20	552.750.000	20	900.000.000		
1.01.02.1.01.002 - Peningkatan Kualitas Pendidikan bagi seluruh pendidik untuk peningkatan pembelajaran, keberhasilan, dan ketahanan				600.000.000		275.000.000		800.000.000		552.750.000		900.000.000		
Terdapatnya satuan pendidikan dengan peningkatan pembelajaran, keberhasilan, dan ketahanan	Unitas Kegiatan pembelajaran bagi seluruh pendidik untuk peningkatan pembelajaran, keberhasilan, dan ketahanan (Kegiatan)		1	600.000.000	1	275.000.000	1	800.000.000	1	552.750.000	1	900.000.000		
1.01.02.1.01.003 - Meningkatkan Tolak Prestasi, dan Ketahanan (TKP) untuk Peningkatan Kualitas Belajar Pendidikan				900.000.000		220.000.000		800.000.000		598.330.000		900.000.000		
Terdapatnya Tolak Prestasi, dan Ketahanan (TKP) untuk Peningkatan Kualitas Belajar Pendidikan	Unitas Peserta Didik yang Tolak Prestasi, dan Ketahanan (TKP) untuk Peningkatan Kualitas Belajar Pendidikan yang Ketahanan (TKP)	200	200	900.000.000	300	220.000.000	200	800.000.000	200	598.330.000	200	900.000.000		
1.01.02.1.01.004 - Peningkatan Peningkatan Peserta Didik				0		0		0		0		0		
Peningkatan Peserta Didik yang Terselesa	Unitas Peningkatan Peserta Didik yang Terselesa (Peningkatan)			0		0		0		0		0		
1.01.02.1.01.005 - Meningkatkan Belajar/Berat Belajar, Peningkatan dan Belajar/PNU				800.000.000		600.000.000		730.000.000		798.000.000		870.000.000		
Belajar, Peningkatan dan Belajar/PNU yang Terselesa (Belajar/Berat Belajar)	Unitas Belajar, Peningkatan dan Belajar/PNU yang Terselesa (Belajar/Berat Belajar)	4	4	800.000.000	3	600.000.000	3	730.000.000	4	798.000.000	3	870.000.000		
1.01.02.1.01.006 - Peningkatan Peningkatan dan Belajar/PNU yang Terselesa (Belajar/Berat Belajar)				800.000.000		500.000.000		600.000.000		600.000.000		730.000.000		
Belajar/Berat Belajar dan Belajar/PNU yang Terselesa (Belajar/Berat Belajar)	Unitas Belajar/Berat Belajar dan Belajar/PNU yang Terselesa (Belajar/Berat Belajar)	5	5	800.000.000	5	500.000.000	5	600.000.000	5	600.000.000	5	730.000.000		
1.01.02.1.01.007 - Meningkatkan Belajar/Berat Belajar dan Belajar/PNU yang Terselesa (Belajar/Berat Belajar)				0		0		0		0		0		
Belajar/Berat Belajar dan Belajar/PNU yang Terselesa (Belajar/Berat Belajar)	Unitas Belajar/Berat Belajar dan Belajar/PNU yang Terselesa (Belajar/Berat Belajar)			0		0		0		0		0		
1.01.02.1.01.008 - Meningkatkan Belajar/Berat Belajar dan Belajar/PNU yang Terselesa (Belajar/Berat Belajar)				1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		
Belajar/Berat Belajar dan Belajar/PNU yang Terselesa (Belajar/Berat Belajar)	Unitas Belajar/Berat Belajar dan Belajar/PNU yang Terselesa (Belajar/Berat Belajar)	5	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000		
1.01.02.1.01.009 - Peningkatan Belajar/Berat Belajar dan Belajar/PNU yang Terselesa (Belajar/Berat Belajar)				22.915.570.000		22.915.570.000		22.915.570.000		22.915.570.000		22.915.570.000		
Belajar/Berat Belajar dan Belajar/PNU yang Terselesa (Belajar/Berat Belajar)	Unitas Belajar/Berat Belajar dan Belajar/PNU yang Terselesa (Belajar/Berat Belajar)	124	124	22.915.570.000	124	22.915.570.000	124	22.915.570.000	124	22.915.570.000	124	22.915.570.000		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2014	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah	Keterangan
			2016		2017		2018		2019		2020			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
2015	2016	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2016	2017
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, Supremasi dan Eksklusif Laporan di Bidang Pendidikan (Dokumen)		1		1		1		1		1			
	Jumlah kegiatan pemberdayaan bagi aktor pendidik untuk peningkatan pemahaman, keterampilan, dan etos kerja (Kegiatan)		1		1		1		1		1			
	Jumlah kegiatan sosialisasi dan edukasi terhadap di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Kegiatan)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Komunitas Belajar Mandiri dan Tenaga Pendidik yang terbentuk (Komunitas)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Menjalankan Pendidikan Pengajaran Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TK) untuk Pendidikan Orang													
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Koneksi Perangkat Genggam, Penerimaan Pemasaran, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)		100		100		100		100		100			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Sektor Pendidikan Nonformal/Komunitas (Orang)	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		
	Jumlah Peningkatan Sekolah yang Tersedia (Pagu)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Peningkatan Sekolah Teknik, Politeknik, dan Ilmu Keguruan (TK) untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)		200		200		200		200		200			
	Jumlah Peningkatan Sekolah/Komunitas yang Mendukung Riset Peningkatan Pendidikan (Peningkatan)	1.000	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			
	Jumlah Peningkatan Sekolah yang Mengikuti Aspek Kompetensi, Akademi dan Non Akademi (Peningkatan)		25		25		25		25		25			
	Jumlah peserta pelatihan/pengembangan akademik di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)		80		80		80		80		80			
	Jumlah Peningkatan Sekolah yang Terakreditasi Sekolah Menengah Pertama (Peningkatan)		4		4		4		4		4			
	Jumlah Sekolah, Peningkatan dan Akademi Sekolah yang Terakreditasi Sekolah Menengah Pertama (Peningkatan)		3		3		3		3		3			
	Jumlah Sekolah Pendidikan yang Mendukung Peningkatan Pendidikan (Peningkatan)	107	107		107		107		107		107			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBSEKSIAN OUTPUT	INDUKTOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2014	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2015		2017		2018		2019		2020			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Jumlah Sekolah NarkomKawanan yang Observasi Perilaku Keterampilan dan Manajemen (Status Pendidikan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		200	200		200		200		200					
1.01.02.34.001 - Pengadaan Kaya Pusat Penerimaan NarkomKawanan				400.000.000		500.000.000		600.000.000		800.000.000		720.000.000		
Basis Penerima Penerimaan NarkomKawanan diterima dan penerimaan	Jumlah Penerima Penerimaan NarkomKawanan yang Basis Penerima Penerimaan NarkomKawanan (Status Pendidikan)	1.431	1.300	400.000.000	1.300	500.000.000	1.300	600.000.000	1.300	800.000.000	1.300	720.000.000		
1.01.02.34.004 - Pengadaan Penerima dan Tenaga Kependidikan yang Penerimaan NarkomKawanan				9.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		21.000.000.000		
Penerima dan Tenaga Kependidikan Tenaga Kependidikan yang Penerimaan NarkomKawanan	Jumlah Penerima dan Tenaga Kependidikan yang Penerimaan NarkomKawanan (Gong)	0.000	0.000	9.000.000.000	0.000	10.000.000.000	0.000	10.000.000.000	0.000	10.000.000.000	0.000	21.000.000.000		
1.01.02.34.005 - Pengadaan Karya Penerima dan Tenaga Kependidikan pada Penerimaan NarkomKawanan				90.000.000		100.000.000		140.000.000		180.000.000		200.000.000		
Penerima dan Tenaga Kependidikan yang Penerimaan Penerima Penerimaan Penerimaan Penerimaan Penerimaan Penerimaan Penerimaan Penerimaan	Jumlah Penerima dan Tenaga Kependidikan yang Penerimaan Penerima Penerimaan Penerimaan Penerimaan Penerimaan Penerimaan Penerimaan Penerimaan Penerimaan Penerimaan Penerimaan	100	100	90.000.000	100	100.000.000	100	140.000.000	100	180.000.000	100	200.000.000		
1.01.02.34.006 - Penerimaan Keterampilan dan Manajemen Sekolah NarkomKawanan				90.000.000		100.000.000		140.000.000		180.000.000		200.000.000		
Teknik Penerimaan Penerimaan Keterampilan dan Manajemen Sekolah NarkomKawanan	Jumlah Sekolah NarkomKawanan yang Observasi Perilaku Keterampilan dan Manajemen (Status Pendidikan)	0	0	90.000.000	0	100.000.000	0	140.000.000	0	180.000.000	0	200.000.000		
1.01.02.34.007 - Pengadaan Dana BOP Sekolah NarkomKawanan				10.742.400.000		10.742.400.000		10.742.400.000		10.742.400.000		10.742.400.000		
Teknik Penerima Penerimaan Dana BOP Sekolah NarkomKawanan	Jumlah Sekolah NarkomKawanan yang Observasi Perilaku Keterampilan dan Manajemen (Status Pendidikan)			10.742.400.000		10.742.400.000		10.742.400.000		10.742.400.000		10.742.400.000		
1.01.02.34.008 - Pengadaan Keterampilan Penerimaan Dana BOP Sekolah NarkomKawanan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		200.000.000		
Berpartisipasi Penerimaan Penerimaan Dana BOP Sekolah NarkomKawanan	Jumlah Penerima yang Berpartisipasi Keterampilan Penerimaan Dana BOP Sekolah NarkomKawanan (Gong)	124	124	100.000.000	124	100.000.000	124	100.000.000	124	100.000.000	124	200.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKELOMPOK OUTPUT	INDUKTOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
1.01.02.1.04.001 - Peningkatan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				0		0		0		0		0		
Tekniksarung Pendidikan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Melakukan Peningkatan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)			0		0		0		0		0		
1.01.02.1.04.002 - Peningkatan Penggunaan Aplikasi Belajar Pendidikan				60.000.000		160.000.000		161.000.000		166.000.000		219.010.000		
Tekniksarung pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)		60	60.000.000	60	160.000.000	60	161.000.000	60	166.000.000	60	219.010.000		
1.01.02.1.04.003 - Koordinasi Perencanaan, Raperan dan Eksekusi Layanan di Bidang Pendidikan				60.000.000		160.000.000		161.000.000		166.000.000		219.010.000		
Tekniksarung Koordinasi Perencanaan, Raperan dan Eksekusi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan, Raperan dan Eksekusi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)		1	60.000.000	1	160.000.000	1	161.000.000	1	166.000.000	1	219.010.000		
1.01.02.1.04.004 - Koordinasi dan Alokasi Kegiatan Belajar Pendidikan				60.000.000		110.000.000		121.000.000		133.400.000		146.410.000		
Tekniksarung kegiatan koordinasi dan alokasi kegiatan di bidang Pendidikan (Dokumen)	Jumlah kegiatan koordinasi dan alokasi kegiatan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)		1	60.000.000	1	110.000.000	1	121.000.000	1	133.400.000	1	146.410.000		
1.01.02.1.04.005 - Fasilitas Komunitas Berapa-Pendek dan Tenaga Kependidikan				60.000.000		160.000.000		161.000.000		166.000.000		219.010.000		
Komunitas Berapa-Pendek dan Tenaga Kependidikan yang terakreditasi	Jumlah Komunitas Berapa-Pendek dan Tenaga Kependidikan yang terakreditasi (Komunitas)		1	60.000.000	1	160.000.000	1	161.000.000	1	166.000.000	1	219.010.000		
1.01.02.1.04.006 - Peningkatan sumber pendukung bagi satuan pendidikan untuk peningkatan pendanaan, kelembagaan dan sistem				60.000.000		110.000.000		121.000.000		133.400.000		146.410.000		
Tekniksarung satuan pendidikan dalam peningkatan pendanaan, kelembagaan dan sistem	Jumlah kegiatan peningkatan bagi satuan pendidikan untuk peningkatan pendanaan, kelembagaan dan sistem (Kegiatan)		1	60.000.000	1	110.000.000	1	121.000.000	1	133.400.000	1	146.410.000		
1.01.02.1.04.007 - Fasilitas untuk kompetensi bagi pendidik dalam Pendidikan Nonformal/Kelembagaan				60.000.000		275.000.000		302.500.000		332.750.000		368.325.000		
Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kelembagaan yang mendapat sertifikat kompetensi	Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kelembagaan yang mendapat sertifikat kompetensi (Orang)		300	60.000.000	300	275.000.000	300	302.500.000	300	332.750.000	300	368.325.000		
1.01.02.1.04.008 - Peningkatan Minat Besar dan Keaktifan Peserta Didik				60.000.000		160.000.000		161.000.000		166.000.000		219.010.000		
Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/olimpiade Matematika dan Non Matematika	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lolimpiade Matematika dan Non Matematika (Peserta Didik)		25	60.000.000	25	160.000.000	25	161.000.000	25	166.000.000	25	219.010.000		
1.01.02.1.04.009 - Peningkatan Peningkatan Fasilitas				71.100.000		80.400.000		88.111.000		97.362.000		107.090.000		
Peningkatan Fasilitas yang Tersedia	Jumlah Peningkatan Fasilitas yang tersedia (Fasilitas)		1	71.100.000	1	80.400.000	1	88.111.000	1	97.362.000	1	107.090.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBSEKSIAN OUTPUT	INDUKTOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2014	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2015		2017		2018		2019		2020			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
1.01.02.1.04.001 - Rehabilitasi Sedang/Rendah Secara Fisik/Struktur dan Utilitas Sekolah				600.000.000		600.000.000		730.000.000		790.000.000		870.000.000		
Sekolah Fisik/Struktur dan Utilitas Sekolah yang Terakreditasi Sedang/Rendah	Jumlah Sekolah Fisik/Struktur dan Utilitas Sekolah yang Telah Diterbitkan Sedang/Rendah (Unit)		2	600.000.000	2	600.000.000	2	730.000.000	2	790.000.000	2	870.000.000		
1.01.02.1.04.002 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang (MT) untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				200.000.000		200.000.000		240.000.000		260.000.000		290.000.000		
Teknis/Struktur Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang (MT) untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang (MT) untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang Materikan (orang)		250	200.000.000	250	200.000.000	250	240.000.000	250	260.000.000	250	290.000.000		
1.01.02.1.04.003 - Peningkatan Proses Belajar Mengajar (PBM)				300.000.000		300.000.000		360.000.000		390.000.000		430.000.000		
Terakreditasi/Proses Belajar Mengajar Proses Belajar Mengajar (PBM)	Jumlah Sekolah Pendidikan yang Diterbitkan/Proses Belajar (PBM) (Unit)	107	107	300.000.000	107	300.000.000	107	360.000.000	107	390.000.000	107	430.000.000		
1.01.02.1.04.004 - Peningkatan Mutu Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidikan (PMP)				0		0		0		0		0		
Mut PMP dan Pening Mutu Pendidikan PMP (PMP)	Jumlah Mutu PMP dan Pening Mutu Pendidikan yang Terakreditasi (PMP) (Unit)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.01.02.1.04.005 - Rehabilitasi Sedang/Rendah Ruang Kelas Sekolah				600.000.000		1.000.000.000		2.100.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		
Ruang Kelas Sekolah yang Terakreditasi Sedang/Rendah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Diterbitkan Sedang/Rendah (Ruang)	0	0	600.000.000	0	1.000.000.000	0	2.100.000.000	0	2.000.000.000	0	2.000.000.000		
1.01.02.1.04.006 - Rehabilitasi Sedang/Rendah Ruang Kelas Sekolah				600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		700.000.000		
Meningkatkan Kualitas Kurikulum Pendidikan	Peningkatan Kualitas Kurikulum yang Mengembangkan Kurikulum Materi Lokal (Unit)	25	25	600.000.000	25	600.000.000	25	600.000.000	25	600.000.000	25	700.000.000	1.01.02.1.04.006.001 - Dinas Pendidikan	
1.01.02.1.04.007 - Peningkatan Mutu Materi Lokal Pendidikan Dasar				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		400.000.000		
Peningkatan Mutu Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Materi Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Peningkatan Mutu Materi Lokal Pendidikan Dasar yang Mengembangkan Kurikulum (Unit)	30	30	300.000.000		300.000.000	30	300.000.000	30	300.000.000	30	400.000.000		
	Jumlah Kurikulum Materi Lokal Pendidikan Dasar yang Terakreditasi (Unit)													
	Jumlah Kurikulum Materi Lokal Pendidikan Dasar yang Terakreditasi (Unit)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Kurikulum Materi Lokal Pendidikan Dasar yang Terakreditasi (Unit)		1		1		1		1		1			
1.01.02.1.04.008 - Peningkatan Mutu Materi Lokal Pendidikan Dasar				600.000.000		100.000.000		120.000.000		130.000.000		160.000.000		
Materi Lokal Pendidikan Dasar Terakreditasi	Jumlah Materi Lokal Pendidikan Dasar yang Terakreditasi (Unit)	2	1	600.000.000	1	100.000.000	1	120.000.000	1	130.000.000	1	160.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKELOMPOK OUTPUT	INDUKTOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
202	202	202	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205
1.01.02.1.01.004 - Pembiayaan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				50.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		
Pengantar Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Mengikuti Kompetensinya	Jumlah Pengantar Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Mengikuti Kompetensinya (Daerah)	30	30	50.000.000		110.000.000	30	121.000.000	30	133.100.000	30	146.410.000		
1.01.02.1.01.006 - Pengadaan model/model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar				50.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		
Terselenggaranya model/model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Jumlah model/model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang terselenggara (Daerah)	1	1	50.000.000	1	110.000.000	1	121.000.000	1	133.100.000	1	146.410.000		
1.01.02.1.01.007 - Pengadaan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar				0		0		0		0		0		
Terselenggaranya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Terselenggara (Daerah)			0		0		0		0		0		
1.01.02.1.02 - Peningkatan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				200.000.000		220.000.000		242.000.000		266.300.000		292.920.000		
Peningkatan Standar Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Muatan Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Terselenggara (Daerah)	2	1	200.000.000	1	220.000.000	1	242.000.000	1	266.300.000	1	292.920.000		
	Jumlah model/model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang terselenggara (Daerah)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Terselenggara (Daerah)													
1.01.02.1.02.001 - Pengadaan Standar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				50.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		
Standar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Terselenggara	Jumlah Standar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Terselenggara (Daerah)	2	1	50.000.000	1	110.000.000	1	121.000.000	1	133.100.000	1	146.410.000		
1.01.02.1.02.003 - Pengadaan model/model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				50.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		
Terselenggaranya model/model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah model/model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang terselenggara (Daerah)	1	1	50.000.000	1	110.000.000	1	121.000.000	1	133.100.000	1	146.410.000		
1.01.02.1.02.005 - Pengadaan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				0		0		0		0		0		

Secara keseluruhan, tabel ini memberikan peta operasional yang terukur bagi perangkat daerah dalam merumuskan Renstra. Semua sasaran disusun linier, mulai dari NSPK, tujuan, sasaran, outcome, hingga output yang dapat diverifikasi melalui indikator kinerja kuantitatif. Rangkaian program/kegiatan/sub kegiatan ini menjadi pedoman implementasi bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, penguatan akuntabilitas, hingga pencapaian tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

4.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran operasional dari tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Penyusunan rencana ini dilakukan secara sistematis dan terukur berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sebelumnya serta mempertimbangkan isu strategis prioritas, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif.

Program yang direncanakan terdiri atas rangkaian intervensi yang akan dilaksanakan oleh perangkat Dinas Pendidikan dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, penguatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum, dan pembinaan Sekolah. Masing-masing program dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki keluaran (*output*) yang jelas dan terukur, serta berorientasi pada pencapaian *outcome* berupa meningkatnya kepuasan dan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan.

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya, setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan dilengkapi dengan rencana kebutuhan pendanaan yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Alokasi anggaran diprioritaskan pada kegiatan strategis yang mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan, penguatan kapasitas aparatur, digitalisasi layanan, serta perluasan akses dan partisipasi masyarakat. Pendekatan pendanaan dilakukan secara berkelanjutan dan bertahap agar implementasi program mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan Dinas Pendidikan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

Dengan rencana program dan pembiayaan yang terarah, diharapkan seluruh rangkaian kebijakan dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029 dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan, serta menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang inklusif

dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

Tabel 4. 2
Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan

(DATA PROGRAM DIAMBIL DARI RPJMD TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH. JIKA INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN LEBIH DARI SATU MAKA ANGGARAN DIPECAH SESUAI JUMLAH INDIKATORNYA TIDAK BOLEH GELENDONGAN)

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET ·
		2026		2027		2028		2029		2030		
		TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	AA	AA	728.458.981.0 63,00	AA	754.803.022.4 17,00	AA	830.508.324. 658,70	AA	913.509.157. 124,57	AA	1.004.810.07 2.837,03	AA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	136.391.400,00		186.180.000,00		236.380.000,00		205.018.000,0 0		225.519.800,0 0		248.071.780,0 0	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.074.400,00	2	93.900.000,00	2	43.900.000,00	2	48.290.000,00	2	53.119.000,00	2	58.430.900,00	2
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13.347.500,00	1	12.790.000,00	1	12.790.000,00	1	14.069.000,00	1	15.475.900,00	1	17.023.490,00	1
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	7.505.000,00	1	12.790.000,00	1	7.990.000,00	1	8.789.000,00	1	9.667.900,00	1	10.634.690,00	1
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	5.842.500,00	1	6.100.000,00	1	6.100.000,00	1	6.710.000,00	1	7.381.000,00	1	8.119.100,00	1
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.600.000,00	1	7.300.000,00	1	7.300.000,00	1	8.030.000,00	1	8.833.000,00	1	9.716.300,00	1
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	52.022.000,00	1	53.300.000,00	1	53.300.000,00	1	58.630.000,00	1	64.493.000,00	1	70.942.300,00	1
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							-		-		-	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah							-		-		-	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				1	25.000.000,00	1	27.500.000,00	1	30.250.000,00	1	33.275.000,00	1
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah				1	50.000.000,00							1

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET .
		2026		2027		2028		2029		2030		
		TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				2	30.000.000,00	2	33.000.000,00	2	36.300.000,00	2	39.930.000,00	3
Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu							-		-		-	
Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan							-		-		-	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	690.470.529.41 9,00		714.686.139.73 7,00		744.079.423.21 7,00		818.487.365.5 38,70		900.336.102.0 92,57		990.369.712.3 01,83	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	690.426.876.91 9,00		714.647.782.73 7,00		744.039.423.21 7,00		818.443.365.5 38,70		900.287.702.0 92,57		990.316.472.3 01,83	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							-		-		-	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	21.470.000,00	1	13.794.000,00	1	20.000.000,00	1	22.000.000,00	1	24.200.000,00	1	26.620.000,00	1
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							-		-		-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							-		-		-	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan							-		-		-	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET .
		2026		2027		2028		2029		2030		
		TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	22.182.500,00	1	24.563.000,00	1	20.000.000,00	1	22.000.000,00	1	24.200.000,00	1	26.620.000,00	1
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							-		-		-	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	31.980.800,00		85.000.000,00		70.000.000,00		77.000.000,00		84.700.000,00		93.170.000,00	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	22.000.000,00	1	24.200.000,00	1	26.620.000,00	1
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1	15.000.000,00				-		-		-	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD							-		-		-	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD							-		-		-	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	31.980.800,00	1	15.000.000,00	1	25.000.000,00	1	27.500.000,00	1	30.250.000,00	1	33.275.000,00	1
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1	40.000.000,00	1	25.000.000,00	1	27.500.000,00	1	30.250.000,00	1	33.275.000,00	1
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD							-		-		-	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	120.828.000,00		600.000.000,00		425.000.000,00		467.500.000,00		514.250.000,00		565.675.000,00	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai							-		-		-	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00	1
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1	50.000.000,00	1	25.000.000,00	1	27.500.000,00	1	30.250.000,00	1	33.275.000,00	1

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET .
		2026		2027		2028		2029		2030		
		TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian							-		-		-	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	25.000.000,00			1	25.000.000,00	1	27.500.000,00	1	30.250.000,00	1	33.275.000,00	1
Pemulangan Pegawai yang Pensiun				10	25.000.000,00	10	27.500.000,00	10	30.250.000,00	10	33.275.000,00	10
Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas							-		-		-	
Pemindahan Tugas ASN							-		-		-	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							-		-		-	
Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan		100	150.000.000,00	100	100.000.000,00	100	110.000.000,00	100	121.000.000,00	100	133.100.000,00	100
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	95.828.000,00	734	350.000.000,00	734	150.000.000,00	734	165.000.000,00	734	181.500.000,00	734	199.650.000,00	734
Administrasi Umum Perangkat Daerah	565.084.300,00		705.000.000,00		450.000.000,00		495.000.000,00		544.500.000,00		598.950.000,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							-		-		-	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	236.025.100,00	1	225.000.000,00	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00	1
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	42.498.900,00	1	70.000.000,00	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.500.000,00	1	66.550.000,00	1
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000,00	1	70.000.000,00	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.500.000,00	1	66.550.000,00	1
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	71.560.400,00	1	70.000.000,00	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.500.000,00	1	66.550.000,00	1
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000,00	1	70.000.000,00	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.500.000,00	1	66.550.000,00	1

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET ·
		2026		2027		2028		2029		2030		
		TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Bahan/Material							-		-		-	
Fasilitasi Kunjungan Tamu							-		-		-	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114.999.900,00	1	200.000.000,00	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00	1
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							-		-		-	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.500.000,00	1	66.550.000,00	1
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.000.000,00		2.000.000.000,00		430.531.440,00		473.584.584,00		520.943.042,40		573.037.346,64	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							-		-		-	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							-		-		-	
Pengadaan Alat Besar							-		-		-	
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor							-		-		-	
Pengadaan Mebel				1	300.000.000,00	1	330.000.000,00	1	363.000.000,00	1	399.300.000,00	1
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000,00	4	2.000.000.000,00	3	130.531.440,00	3	143.584.584,00	3	157.943.042,40	3	173.737.346,64	3
Pengadaan Aset Tetap Lainnya							-		-		-	
Pengadaan Aset Tak Berwujud							-		-		-	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							-		-		-	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET .
		2026		2027		2028		2029		2030		
		TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							-		-		-	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							-		-		-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.622.701.600,00		9.684.277.600,00		8.811.687.760,00		9.692.856.536,00		10.662.142.189,60		11.728.356.408,56	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat							-		-		-	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.424.000,00	1	120.000.000,00	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00	1
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							-		-		-	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.546.277.600,00	1	9.564.277.600,00	1	8.711.687.760,00	1	9.582.856.536,00	1	10.541.142.189,60	1	11.595.256.408,56	1
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.759.780,00		512.383.726,00		300.000.000,00		610.000.000,00		621.000.000,00		633.100.000,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.000.000,00						-		-		-	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		6	112.383.726,00	6	100.000.000,00	6	110.000.000,00	6	121.000.000,00	6	133.100.000,00	6
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar							-		-		-	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya							-		-		-	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET .
		2026		2027		2028		2029		2030		
		TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor												
Pemeliharaan Mebel							-		-		-	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							-		-		-	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya							-		-		-	
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud							-		-		-	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	175.759.780,00	2	400.000.000,00	2	200.000.000,00	2	500.000.000,0 0	2	500.000.000,0 0	2	500.000.000,0 0	2
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							-		-		-	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							-		-		-	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah							-		-		-	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							-		-		-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			358.104.403.80 0,00		68.513.235.960 ,00		77.184.559.55 6,00		80.844.711.65 6,00		84.870.878.96 6,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			357.304.403.80 0,00		67.613.235.960 ,00		76.194.559.55 6,00		79.755.711.65 6,00		83.672.978.96 6,00	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	180.775.272.75 0,00		195.014.640.00 0,00		21.136.725.960 ,00		24.090.398.55 6,00		24.090.398.55 6,00		24.090.398.55 6,00	
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)							-		-		-	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET ·
		2026		2027		2028		2029		2030		
		TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.182.354.000,00	10	2.004.150.000,00	3	600.000.000,00	4	800.000.000,00	4	800.000.000,00	4	800.000.000,00	4
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	3.398.281.000,00	22	3.220.000.000,00	3	600.000.000,00	4	800.000.000,00	4	800.000.000,00	4	800.000.000,00	4
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.584.644.000,00	22	4.294.578.400,00	3	600.000.000,00	4	800.000.000,00	4	800.000.000,00	4	800.000.000,00	4
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.143.369.850,00	19	3.800.000.000,00	7	1.400.000.000,00	7	1.540.000.000,00	7	1.540.000.000,00	7	1.540.000.000,00	7
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah							-		-		-	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	3.217.565.600,00	15	2.972.361.600,00	3	600.000.000,00	4	800.000.000,00	4	800.000.000,00	4	800.000.000,00	4
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.003.184.000,00	5	825.000.000,00	3	600.000.000,00	4	800.000.000,00	4	800.000.000,00	4	800.000.000,00	4
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	3.085.204.000,00	24	3.440.000.000,00	3	600.000.000,00	4	800.000.000,00	4	800.000.000,00	4	800.000.000,00	4
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah							-		-		-	
Pengadaan Mebel Sekolah	6.026.761.300,00	100	8.106.230.000,00	25	5.000.000.000,00	25	5.500.000.000,00	25	5.500.000.000,00	25	5.500.000.000,00	25
Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah							-		-		-	
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	15.904.794.000,00	50	1.700.000.000,00				-		-		-	
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							-		-		-	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET .
		2026		2027		2028		2029		2030		
		TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	300.000.000,00	45	450.000.000,00	45	500.000.000,00	45	550.000.000,00	45	550.000.000,00	45	550.000.000,00	45
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		134	100.000.000,00	134	150.000.000,00	134	165.000.000,00	134	165.000.000,00	134	165.000.000,00	134
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	3.150.000.000,00	100	2.100.000.000,00	100	2.000.000.000,00	100	2.200.000.000,00	100	2.200.000.000,00	100	2.200.000.000,00	100
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	150.000.000,00	608	200.000.000,00	608	200.000.000,00	608	220.000.000,00	608	220.000.000,00	608	220.000.000,00	608
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	97.718.830.000,00	608	97.718.830.000,00				-		-		-	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	100.000.000,00	608	100.000.000,00	608	250.000.000,00	608	275.000.000,00	608	275.000.000,00	608	275.000.000,00	608
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	7.361.204.100,00	36	7.183.000.000,00				-		-		-	
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar							-		-		-	
Pemeliharaan Mebel Sekolah							-		-		-	
Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar							-		-		-	
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				608	200.000.000,00	608	220.000.000,00	608	220.000.000,00	608	220.000.000,00	608
Pengembangan konten digital untuk pendidikan							-		-		-	
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				608	250.000.000,00	608	275.000.000,00	608	275.000.000,00	608	275.000.000,00	608

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET ·
		2026		2027		2028		2029		2030		
		TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	165.000.000,00	1	165.000.000,00	1	165.000.000,00	1
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	165.000.000,00	1	165.000.000,00	1	165.000.000,00	1
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				3	100.000.000,00	3	110.000.000,00	3	110.000.000,00	3	110.000.000,00	3
Penyediaan infrastruktur TIK							-		-		-	
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	220.000.000,00	1	220.000.000,00	1
Penataan Ruang/Sudut Baca							-		-		-	
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik				1220	158.600.000,00	1220	174.460.000,00	1220	174.460.000,00	1220	174.460.000,00	1220
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				1	427.000.000,00	1	469.700.000,00	1	469.700.000,00	1	469.700.000,00	1
Pembangunan Ruang Kelas Baru		111	12.930.730.000,00	8	1.500.000.000,00	8	1.650.000.000,00	8	1.650.000.000,00	8	1.650.000.000,00	8
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.747.963.900,00	24	4.001.760.000,00	5	1.000.000.000,00	5	1.100.000.000,00	5	1.100.000.000,00	5	1.100.000.000,00	5
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	271.451.000,00	608	300.000.000,00	608	400.000.000,00	608	440.000.000,00	608	440.000.000,00	608	440.000.000,00	608
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	87.500.000,00	608	100.000.000,00	608	350.000.000,00	608	385.000.000,00	608	385.000.000,00	608	385.000.000,00	608

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET .
		2026		2027		2028		2029		2030		
		TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	29.897.641.900,00	132	26.518.000.000,00	16	2.151.125.960,00	16	2.366.238.556,00	16	2.366.238.556,00	16	2.366.238.556,00	16
Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus							-		-		-	
Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus							-		-		-	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	366.320.000,00	345	550.000.000,00	300	500.000.000,00	300	550.000.000,00	300	550.000.000,00	300	550.000.000,00	300
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.878.204.100,00	22	12.200.000.000,00	5	500.000.000,00	5	550.000.000,00	5	550.000.000,00	5	550.000.000,00	5
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	124.681.165.054,00		108.895.237.800,00		20.123.360.000,00		23.115.696.000,00		23.778.001.600,00		24.506.537.760,00	
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)							-		-		-	
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	578.340.000,00	6	1.778.340.000,00	3	600.000.000,00	4	800.000.000,00	4	800.000.000,00	4	800.000.000,00	4
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	760.000.000,00	4	660.000.000,00	3	600.000.000,00	4	800.000.000,00	4	800.000.000,00	4	800.000.000,00	4
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	248.145.000,00	8	1.632.146.000,00	3	600.000.000,00	4	800.000.000,00	4	800.000.000,00	4	800.000.000,00	4
Pembangunan Laboratorium	2.018.906.354,00	10	1.918.730.000,00	3	600.000.000,00	4	800.000.000,00	4	800.000.000,00	4	800.000.000,00	4
Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula							-		-		-	
Pembangunan Asrama Sekolah							-		-		-	
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah							-		-		-	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET ·
		2026		2027		2028		2029		2030		
		TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pembangunan Fasilitas Parkir							-		-		-	
Pembangunan Kantin Sekolah							-		-		-	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.298.535.000,00	25	3.354.000.000,00	5	1.000.000.000,00	5	1.100.000.000,00	5	1.100.000.000,00	5	1.100.000.000,00	5
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	14.883.897.700,00	80	15.887.000.000,00	10	2.000.000.000,00	10	2.200.000.000,00	10	2.200.000.000,00	10	2.200.000.000,00	10
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	285.000.000,00	2	268.000.000,00	3	600.000.000,00	4	800.000.000,00	4	800.000.000,00	4	800.000.000,00	4
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1.542.000.000,00	7	1.525.000.000,00	3	600.000.000,00	4	800.000.000,00	4	800.000.000,00	4	800.000.000,00	4
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	2.607.240.000,00	12	2.607.240.000,00	3	600.000.000,00	4	800.000.000,00	4	800.000.000,00	4	800.000.000,00	4
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula							-		-		-	
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah							-		-		-	
Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir							-		-		-	
Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah							-		-		-	
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.050.000.000,00	5	933.000.000,00	6	900.000.000,00	6	990.000.000,00	6	990.000.000,00	6	990.000.000,00	6
Pengadaan Mebel Sekolah	5.099.921.000,00	109	5.489.545.000,00	50	5.000.000.000,00	50	5.500.000.000,00	50	5.500.000.000,00	50	5.500.000.000,00	50
Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah							-		-		-	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET .
		2026		2027		2028		2029		2030		
		TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	34.678.870.000,00	5	200.000.000,00	5	102.400.000,00	5	112.640.000,00	5	112.640.000,00	5	112.640.000,00	5
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							-		-		-	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	300.000.000,00	142	550.000.000,00	140	500.000.000,00	140	550.000.000,00	140	550.000.000,00	140	550.000.000,00	140
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	300.000.000,00	45	400.000.000,00	45	300.000.000,00	45	330.000.000,00	45	330.000.000,00	45	330.000.000,00	45
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		150	250.000.000,00	150	100.000.000,00	150	110.000.000,00	150	110.000.000,00	150	110.000.000,00	150
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	150.000.000,00	50	1.050.000.000,00	50	250.000.000,00	50	275.000.000,00	50	302.500.000,00	50	332.750.000,00	50
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	150.000.000,00	128	150.000.000,00	128	300.000.000,00	128	330.000.000,00	128	363.000.000,00	128	399.300.000,00	128
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	47.853.240.000,00	128	47.853.240.000,00	128		128	-	128	-	128	-	128
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	100.000.000,00	127	250.000.000,00	127	250.000.000,00	127	275.000.000,00	127	302.500.000,00	127	332.750.000,00	127
Pemeliharaan Mebel Sekolah							-		-		-	
Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama							-		-		-	
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan							-		-		-	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET ·
		2026		2027		2028		2029		2030		
		TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengembangan konten digital untuk pendidikan							-		-		-	
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				128	200.000.000,00	128	220.000.000,00	128	242.000.000,00	128	266.200.000,00	128
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	100.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	266.200.000,00	1
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	100.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	266.200.000,00	1
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				5	150.000.000,00	5	165.000.000,00	5	181.500.000,00	5	199.650.000,00	5
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1	150.000.000,00	1	165.000.000,00	1	181.500.000,00	1	199.650.000,00	1
Penataan Ruang/Sudut Baca							-		-		-	
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	100.000.000,00			128	250.000.000,00	128	275.000.000,00	128	302.500.000,00	128	332.750.000,00	128
Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.407.805.000,00	14	1.925.000.000,00	14	1.000.000.000,00	14	1.100.000.000,00	14	1.210.000.000,00	14	1.331.000.000,00	14
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	400.000.000,00	300	500.000.000,00	300	350.000.000,00	300	385.000.000,00	300	423.500.000,00	300	465.850.000,00	300
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik				896	120.960.000,00	896	133.056.000,00	896	146.361.600,00	896	160.997.760,00	896
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		5	1.000.000.000,00				-		-		-	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET ·
		2026		2027		2028		2029		2030		
		TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah							-		-		-	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	3.443.540.000,00	15	3.163.000.000,00	3	600.000.000,00	3	660.000.000,00	3	726.000.000,00	3	798.600.000,00	3
Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus							-		-		-	
Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus							-		-		-	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	2.225.725.000,00	84	15.150.996.800,00	20	2.000.000.000,00	20	2.200.000.000,00	20	2.420.000.000,00	20	2.662.000.000,00	20
Penyediaan infrastruktur TIK							-		-		-	
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	27.686.132.000,00		25.070.358.000,00		6.180.000.000,00		6.798.000.000,00		7.477.800.000,00		8.225.580.000,00	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.050.000.000,00	6	1.300.000.000,00	5	1.000.000.000,00	5	1.100.000.000,00	5	1.210.000.000,00	5	1.331.000.000,00	5
Pengadaan Mebel PAUD				5	500.000.000,00	5	550.000.000,00	5	605.000.000,00	5	665.500.000,00	5
Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD							-		-		-	
Pengadaan Perlengkapan PAUD	5.170.370.000,00	60	680.000.000,00				-		-		-	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	100.000.000,00	500	500.000.000,00	500	250.000.000,00	500	275.000.000,00	500	302.500.000,00	500	332.750.000,00	500
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD				100	200.000.000,00	100	220.000.000,00	100	242.000.000,00	100	266.200.000,00	100
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	200.000.000,00	399	252.000.000,00	300	200.000.000,00	300	220.000.000,00	300	242.000.000,00	300	266.200.000,00	300

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET .
		2026		2027		2028		2029		2030		
		TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	300.000.000,00	956	300.000.000,00	956	300.000.000,00	956	330.000.000,00	956	363.000.000,00	956	399.300.000,00	956
Pengelolaan Dana BOP PAUD	17.219.720.000,00	908	17.219.720.000,00				-		-		-	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	100.000.000,00	908	200.000.000,00	908	200.000.000,00	908	220.000.000,00	908	242.000.000,00	908	266.200.000,00	908
Pemeliharaan Mebel Sekolah							-		-		-	
Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							-		-		-	
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan							-		-		-	
Pengembangan konten digital untuk pendidikan							-		-		-	
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan							-		-		-	
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	266.200.000,00	1
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	165.000.000,00	1	181.500.000,00	1	199.650.000,00	1
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.040.600.000,00	5	1.000.000.000,00				-		-		-	
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	266.200.000,00	1
Pembangunan Ruang Kelas Baru	555.574.000,00	5	1.000.000.000,00				-		-		-	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET ·
		2026		2027		2028		2029		2030		
		TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan infrastruktur TIK							-		-		-	
Penataan Ruang/Sudut Baca							-		-		-	
Pembangunan Perpustakaan Sekolah							-		-		-	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik				20	250.000.000,00	20	275.000.000,00	20	302.500.000,00	20	332.750.000,00	20
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik							-		-		-	
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah							-		-		-	
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1	250.000.000,00	1	275.000.000,00	1	302.500.000,00	1	332.750.000,00	1
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula							-		-		-	
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	100.000.000,00	258	200.000.000,00	258	300.000.000,00	258	330.000.000,00	258	363.000.000,00	258	399.300.000,00	258
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)							-		-		-	
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		5	500.000.000,00				-		-		-	
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							-		-		-	
Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus							-		-		-	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET .
		2026		2027		2028		2029		2030		
		TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus							-		-		-	
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		4	659.600.000,00	3	600.000.000,00	3	660.000.000,00	3	726.000.000,00	3	798.600.000,00	3
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	1.009.000.000,00	5	400.000.000,00	5	500.000.000,00	5	550.000.000,00	5	605.000.000,00	5	665.500.000,00	5
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD							-		-		-	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah							-		-		-	
Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	640.868.000,00	6	559.038.000,00				-		-		-	
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah							-		-		-	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				6	1.080.000.000,00	6	1.188.000.000,00	6	1.306.800.000,00	6	1.437.480.000,00	6
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	22.644.578.000,00		28.324.168.000,00		20.173.150.000,00		22.190.465.000,00		24.409.511.500,00		26.850.462.650,00	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	400.000.000,00	1491	600.000.000,00	1000	500.000.000,00	1000	550.000.000,00	1000	605.000.000,00	1000	665.500.000,00	1000
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	9.000.000.000,00	6000	15.000.000.000,00	6000	15.000.000.000,00	6000	16.500.000.000,00	6000	18.150.000.000,00	6000	19.965.000.000,00	6000
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100.000.000,00			150	200.000.000,00	150	220.000.000,00	150	242.000.000,00	150	266.200.000,00	150
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	100.000.000,00	88	150.000.000,00	88	300.000.000,00	88	330.000.000,00	88	363.000.000,00	88	399.300.000,00	88

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET ·
		2026		2027		2028		2029		2030		
		TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	10.624.080.000,00	60	10.624.080.000,00				-		-		-	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	100.000.000,00	124	100.000.000,00	124	150.000.000,00	124	165.000.000,00	124	181.500.000,00	124	199.650.000,00	124
Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan							-		-		-	
Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan							-		-		-	
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		124	300.000.000,00				-		-		-	
Pengembangan konten digital untuk pendidikan							-		-		-	
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				60	150.000.000,00	60	165.000.000,00	60	181.500.000,00	60	199.650.000,00	60
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1	150.000.000,00	1	165.000.000,00	1	181.500.000,00	1	199.650.000,00	1
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	75.000.000,00			1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00	1
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				1	150.000.000,00	1	165.000.000,00	1	181.500.000,00	1	199.650.000,00	1
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00	1

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET .
		2026		2027		2028		2029		2030		
		TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				200	250.000.000,00	200	275.000.000,00	200	302.500.000,00	200	332.750.000,00	200
Penyediaan infrastruktur TIK							-		-		-	
Penataan Ruang/Sudut Baca							-		-		-	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik				25	150.000.000,00	25	165.000.000,00	25	181.500.000,00	25	199.650.000,00	25
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik							-		-		-	
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik							-		-		-	
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU							-		-		-	
Pembangunan Ruang Kelas Baru							-		-		-	
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	150.000.000,00			1	73.150.000,00	1	80.465.000,00	1	88.511.500,00	1	97.362.650,00	1
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	150.000.000,00			3	600.000.000,00	3	660.000.000,00	3	726.000.000,00	3	798.600.000,00	3
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				250	200.000.000,00	250	220.000.000,00	250	242.000.000,00	250	266.200.000,00	250
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium							-		-		-	
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)							-		-		-	
Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah							-		-		-	
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	200.000.000,00	157	200.000.000,00	157	300.000.000,00	157	330.000.000,00	157	363.000.000,00	157	399.300.000,00	157

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET .
		2026		2027		2028		2029		2030		
		TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pembangunan Ruang Laboratorium							-		-		-	
Pengadaan Mebel Sekolah							-		-		-	
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							-		-		-	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	395.410.000,00						-		-		-	
Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus							-		-		-	
Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus							-		-		-	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	1.350.088.000,00	5	1.350.088.000,00				-		-		-	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah							-		-		-	
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah							-		-		-	
Rehabilitasi Sedang/Berat Taman Bacaan Masyarakat							-		-		-	
Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat							-		-		-	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU							-		-		-	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				8	1.800.000.000,00	8	1.980.000.000,00	8	2.178.000.000,00	8	2.395.800.000,00	8
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	700.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		550.000.000,00		605.000.000,00		665.500.000,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET .
		2026		2027		2028		2029		2030		
		TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	400.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		330.000.000,00		363.000.000,00		399.300.000,00	
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100.000.000,00	2	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00	1
Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar							-		-		-	
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100.000.000,00	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00	30	110.000.000,00	30	121.000.000,00	30	133.100.000,00	30
Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar							-		-		-	
Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	100.000.000,00			1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00	1
Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100.000.000,00	2	100.000.000,00				-		-		-	
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	300.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00	
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	100.000.000,00	2	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00	1
Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal							-		-		-	
Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal							-		-		-	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET .
		2026		2027		2028		2029		2030		
		TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	100.000.000,00			1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00	1
Penyusunan Kompetensi Dasar/ Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	100.000.000,00	2	100.000.000,00				-		-		-	
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	200.000.000,00	85,53	300.000.000,00	88,83	400.000.000,00	92,14	440.000.000,00	95,44	484.000.000,00	100	532.400.000,00	
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	200.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00		440.000.000,00		484.000.000,00		532.400.000,00	
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	100.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	266.200.000,00	1
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	266.200.000,00	1

Tabel 4. 3
 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
**(DATA INI DIAMBIL DARI RPJMD TABEL 3.7 PROGRAM PRIORITAS DAERAH
 RPJMD. ADA TIDAK PROGRAM PRIORITAS SKPD BAPAK/IBU DISITU. KALO ADA
 MASUKAN, KALO TIDAK ADA KOSONGKAN)**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan				
1.	1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KODAK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD 1.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD 1.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD 1.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD 1.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Malar Realisasi Kinerja SKPD 1.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Seklusal Daerah 1.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Rangka PD dan Rangka PD 1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester/ SKPD 1.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1.01.01.2.03.0005 - Rekonalisasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.01.01.2.05.0003 - Pendaftaran dan Pengdahan Administrasi Kepegawaian 1.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan Kinerja Pegawai 1.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 1.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 1.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan 1.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.01.01.2.01.0005 - Pengalihan Nelayan	
			1.01.01.2.01.0006 - Pengalihan Perikanan dan Masak Lempay	
			1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Pemungut Usuan Pemerintahan Daerah	
			1.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			1.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum-Kantor	
			1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Usuan Pemerintahan Daerah	
			1.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan/Citra Operasional atau Lapangan	
			1.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2.	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Berikutnya peserta anak usia sekolah	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
			1.01.02.2.01.0021 - Pengembangan Kari Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
			1.01.02.2.01.0036 - Peningkatan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
			1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Lapangan di Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.01.0041 - Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
			1.01.02.2.01.0043 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk penanganan pendampingan, kekerasan, dan pelanggaran	
			1.01.02.2.01.0045 - Pengembangan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	
			1.01.02.2.01.0046 - Pengadaan Peningkatan Peserta Didik	
			1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	
			1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Gedung/Berat Ruang/Kelas Sekolah	
			1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	
			1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
			1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Gedung/Berat Ruang/Kelas Sekolah	
			1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	
			1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Kari Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
			1.01.02.2.02.0054 - Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
			1.01.02.2.02.0056 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	
			1.01.02.2.02.0062 - Pengadaan Peningkatan Peserta Didik	
			1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktis dan Peraga Peserta Didik	
			1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
			1.01.02.2.03.0011 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	
			1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Kari Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	
			1.01.02.2.03.0017 - Peningkatan Kemandirian dan Manajemen PAUD	
			1.01.02.2.03.0025 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Lapangan di Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.03.0026 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.03.0029 - Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.01.02.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	
			1.01.02.2.03.0037 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan penundungan, kekerasan, dan intoleransi	
			1.01.02.2.03.0039 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.03.0041 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
			1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
			1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	
			1.01.02.2.03.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
			1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.02.2.04.0010 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.02.2.04.0015 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.02.2.04.0024 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
			1.01.02.2.04.0027 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.04.0030 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
			1.01.02.2.04.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	
			1.01.02.2.04.0061 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
3.	1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
			1.01.03.2.01.0004 - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
			1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
			1.01.03.2.02.0002 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
4.	1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.04.2.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	

4.3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran kunci yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis pada tingkat perangkat daerah. IKU berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu memberikan dampak nyata dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam konteks Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029, indikator kinerja utama yang digunakan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pemilihan indikator ini dilakukan karena IKM merupakan ukuran yang paling relevan dan komprehensif dalam menilai mutu layanan yang diterima oleh masyarakat, mencakup aspek kecepatan pelayanan, ketepatan, keterjangkauan, kesopanan petugas, serta kesiapan sarana dan prasarana.

Dengan menjadikan IKM sebagai indikator utama, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang berkomitmen untuk menempatkan kualitas dan inklusivitas pelayanan publik sebagai fokus utama penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pendidikan. Peningkatan nilai IKM bukan hanya mencerminkan perbaikan tata kelola pelayanan secara administratif, tetapi juga menunjukkan sejauh mana masyarakat merasakan manfaat layanan secara langsung.

Target IKM telah ditetapkan secara bertahap mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 dan terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan upaya berkelanjutan untuk memperbaiki ruang pelayanan, meningkatkan kapasitas aparatur, memanfaatkan teknologi informasi, serta memperluas akses pelayanan bagi kelompok masyarakat rentan. Dengan demikian, pencapaian indikator ini menjadi ukuran nyata keberhasilan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang dalam menjawab isu strategis utama, yaitu mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif.

Tabel 4. 4
Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
(DATA INI DIAMBIL DARI RPJMD TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH)

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	1.01.0.00.0.00.01- 0000 - Dinas Pendidikan									
1	Jumlah warga negara usia 7-12 tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan (APS)	%	97,01	99,82	99,84	99,85	99,86	99,87	99,88	
2	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	91,08	91,13	91,18	91,23	91,28	91,33	91,38	
3	Jumlah Warga Negara Usia 13-15 tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan (APS)	%	94,35	99,76	99,78	99,79	99,80	99,81	99,82	
4	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan (APS)	%	94,01	94,11	94,17	94,29	94,37	94,39	94,45	
5	Jumlah Warga Negara usia 7-18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan (APS)	%	97,92	97,94	98,00	98,12	98,20	98,22	98,28	
6	Rata - Rata Kemampuan Literasi Berdasarkan Asesmen Nasional	%	83,53	84,08	84,48	84,78	84,98	85,08	85,13	
7	Rata - Rata Kemampuan Numerasi Berdasrkan Asesemen Nasional	%	69,29	81,72	82,12	82,42	82,62	82,72	82,77	

Tabel tersebut memuat informasi mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kerjanya. Indikator yang ditetapkan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diukur dengan satuan nilai numerik.

Penetapan IKM sebagai indikator kinerja utama didasarkan pada prinsip bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai penerima manfaat layanan. Oleh karena itu, IKM menjadi salah satu instrumen strategis untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap berbagai layanan administrasi dan pemerintahan yang diselenggarakan di bidang Pendidikan.

Target capaian IKM pada rentang tahun 2025 hingga 2030 dirancang dengan tren yang meningkat secara bertahap, yang menggambarkan komitmen Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang dalam melakukan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Pada tahun 2025, nilai target IKM ditetapkan sebesar 90,45, kemudian naik menjadi 90,75 di tahun 2026, 91,00 pada tahun 2027, dan terus meningkat hingga mencapai 91,50 pada tahun 2030.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang pada periode Renstra Tahun 2025–2029 berfokus pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai ukuran utama terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Pendidikan. IKM dipilih sebagai indikator utama karena secara langsung menggambarkan persepsi masyarakat terhadap mutu, kecepatan, aksesibilitas, dan kenyamanan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Dinas Pendidikan.

Berdasarkan tabel di atas, target capaian IKM ditetapkan secara bertahap dan meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2025, IKM ditargetkan sebesar 90,45, kemudian meningkat menjadi 90,75 pada tahun 2026. Tren kenaikan berlanjut hingga mencapai 91,00 di tahun 2027, 91,15 pada tahun 2028, serta 91,30 pada tahun 2029, dan 91,50 pada akhir periode tahun 2030. Pola target yang bergerak naik secara konsisten menunjukkan adanya optimisme dan komitmen Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya secara berkelanjutan.

Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang meningkat secara bertahap dari tahun 2025 hingga tahun 2030 menunjukkan adanya komitmen Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk terus memperbaiki kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Namun demikian, pencapaian target tersebut memerlukan penguatan pada aspek-aspek mendasar yang selama ini menjadi faktor penghambat pelayanan, khususnya terkait ketersediaan ruang pelayanan yang lebih layak dan inklusif, peningkatan kapasitas aparatur dalam pelayanan prima, serta pengembangan sistem layanan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan.

Peningkatan IKM juga memerlukan dukungan dari mekanisme pengawasan dan umpan balik masyarakat, sehingga kualitas pelayanan tidak hanya meningkat secara administratif, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Dengan demikian, target peningkatan IKM tersebut tidak hanya mencerminkan upaya peningkatan nilai kinerja, tetapi juga merupakan bagian dari langkah nyata Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang dalam menjawab isu strategis pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif.

Proyeksi kenaikan nilai IKM ini menunjukkan adanya konsistensi arah kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan publik melalui penerapan standar layanan minimal, penguatan inovasi layanan berbasis digital, peningkatan kapasitas aparatur, serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam memberikan umpan balik melalui survei kepuasan.

Dengan demikian, Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi indikator kinerja utama yang bersifat kuantitatif, terukur, dan dapat dievaluasi secara periodik, sekaligus menjadi dasar pengambilan keputusan strategis dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, akuntabel, dan inklusif di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

4.4. Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) digunakan untuk mengukur kontribusi perangkat daerah terhadap pencapaian indikator kinerja daerah yang bersifat lintas sektor dan dikendalikan oleh perangkat pengampu program tertentu. IKK umumnya ditetapkan untuk perangkat daerah yang memiliki mandat khusus dalam mendukung target-target prioritas pembangunan daerah yang bersifat strategis dan terintegrasi.

Dalam konteks Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029, berdasarkan ketentuan dan pembagian kewenangan antar perangkat daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tidak ditetapkan sebagai pengampu Indikator Kinerja Kunci (IKK). Hal ini karena seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan lebih bersifat fasilitatif, koordinatif, dan pelayanan administratif yang mendukung tercapainya indikator kinerja perangkat daerah lain serta indikator pembangunan daerah secara umum.

Meskipun demikian, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tetap berkewajiban untuk mendukung pencapaian indikator kinerja kunci yang ditetapkan pada tingkat kabupaten melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang relevan. Dengan demikian, peran Dinas Pendidikan lebih ditekankan pada aspek kontribusi dan sinergi, bukan pada pengampuan langsung terhadap indikator kinerja kunci.

Tabel 4. 5
 Indikator Kinerja Kunci Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
 (DATA INI DIAMBIL DARI RPJMD TABEL 4.4 INDIKATOR KINERJA DAERAH PADA BARIS INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK))

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2026	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.01 : UJIAN PEMERINTAHAN SIKAP PENDIDIKAN										
2.	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan (NP5)	positif	%	94,21	94,11	94,17	94,29	94,37	94,39	94,49	
3.	Jumlah Warga Negara usia 7-18 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Keseluruhan (NP6)	positif	%	97,32	97,36	98,02	98,12	98,20	98,22	98,28	
4.	Indeks literasi keamanaan sekolah jenjang SMP	positif	Nilai	71,39	72,80	74,39	75,80	77,39	78,89	80,39	
5.	Indeks literasi keteknikaan sekolah jenjang SD	positif	Nilai	75,34	76,36	77,39	78,39	79,39	80,39	81,39	
6.	Indeks literasi keteknikaan sekolah jenjang SMP	positif	Nilai	70,04	71,04	72,04	73,04	74,04	75,04	76,04	
7.	Jumlah anak usia 7-19 Tahun yang Berpartisipasi dalam pendidikan dasar (NP3)	positif	%	99,98	99,79	99,81	99,82	99,83	99,84	99,89	
8.	Indeks literasi keamanaan sekolah jenjang SD	positif	Nilai	80,48	81,37	82,27	83,17	84,07	84,97	85,87	
9.	Indeks literasi inklusiitas sekolah jenjang SD	positif	Nilai	84,31	85,81	86,31	71,81	74,31	76,81	79,31	
10.	Peningkatan Proporsi Jumlah Tahun PAUD yang Menyalipkan Minimal Akreditasi B	positif	%	49,71	49,83	49,99	50,20	50,49	50,73	52,47	
11.	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D 16	positif	%	87,35	88,40	88,83	89,10	89,33	89,43	89,48	
12.	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	positif	Nilai	80,04	80,34	80,94	81,24	81,44	81,54	81,99	
13.	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	positif	Nilai	84,43	84,96	85,30	85,80	86,89	87,36	88,00	
14.	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	positif	Nilai	80,12	80,80	81,02	81,30	81,50	81,80	81,87	
15.	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	positif	Nilai	77,38	78,48	79,88	79,18	79,38	79,48	79,83	
16.	Indeks literasi inklusiitas sekolah jenjang SMP	positif	Nilai	87,79	88,20	88,60	89,30	89,40	89,80	90,30	

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan berbasis kinerja, setiap perangkat daerah memiliki peran strategis yang berbeda sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang merupakan perangkat daerah yang memiliki Indikator Kinerja Kunci.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, program, serta indikator kinerja yang akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di bidang Pendidikan Kabupaten Sumedang selama lima tahun ke depan.

Dokumen ini tidak disusun secara terpisah dari konteks pembangunan yang lebih luas, melainkan merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Renstra ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2024–2029, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dari pemerintah pusat, serta kebijakan sektoral yang relevan, guna menjamin keterpaduan, sinergi, dan konsistensi arah pembangunan.

Secara garis besar, Rencana Strategis ini menekankan dua fokus utama: peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif. Kedua fokus tersebut diterjemahkan ke dalam strategi operasional yang konkret, program dan kegiatan yang terukur, serta arah kebijakan yang mendukung transformasi digital, efisiensi birokrasi, dan pelibatan aktif masyarakat dalam pembangunan.

Penyusunan Renstra ini tidak hanya bertujuan memenuhi kewajiban administratif, tetapi lebih dari itu, menjadi instrumen penting dalam mewujudkan visi Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang sebagai penyelenggara pemerintahan yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Peran serta seluruh pemangku kepentingan baik internal pemerintahan, masyarakat, maupun mitra pembangunan menjadi kunci dalam keberhasilan implementasi dokumen ini.

Sebagai konsekuensi logis dari arah kebijakan, sasaran, dan program yang telah dirumuskan, kebutuhan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang juga telah diestimasi secara terukur. Proyeksi kebutuhan anggaran Dinas

Pendidikan Kabupaten Sumedang selama periode perencanaan adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2026 : Rp. 735.311.061.417,00
2. Tahun 2027 : Rp. 769.557.953.448,43
3. Tahun 2028 : Rp. 787.138.293.579,74
4. Tahun 2029 : Rp. 805.519.390.815,23
5. Tahun 2030 : Rp. 824.171.748.942,60

Besaran kebutuhan anggaran tersebut mempertimbangkan kebutuhan prioritas, optimalisasi sumber daya, penyesuaian dengan kemampuan fiskal daerah, serta prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Pengelolaan anggaran akan diarahkan secara akuntabel, transparan, dan berbasis kinerja untuk menjamin bahwa setiap rupiah belanja memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

Rencana Tindak Lanjut

Sebagai upaya untuk memastikan implementasi Renstra berjalan sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang akan menyiapkan rencana tindak lanjut (*action plan*) yang terukur dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan tahunan. Beberapa langkah strategis tindak lanjut meliputi:

1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan.

Setiap program, kegiatan, dan sub-kegiatan akan diuraikan lebih detail ke dalam dokumen Renja tahunan, disertai indikator kinerja yang spesifik, target capaian, serta kebutuhan anggaran yang sinkron dengan pagu indikatif.

2. Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan.

Pelaksanaan program akan didukung oleh penataan struktur organisasi, peningkatan kapasitas aparatur, penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas. dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan publik yang efisien dan responsif.

3. Monitoring. Evaluasi. dan Pelaporan Kinerja.

Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang akan menerapkan sistem monitoring dan evaluasi (Monev) yang terukur dan berkelanjutan.

Pelaporan kinerja akan disusun secara periodik untuk mengukur realisasi capaian sasaran, menganalisis deviasi, serta merumuskan langkah perbaikan melalui mekanisme umpan balik.

4. Sinkronisasi dan Koordinasi Lintas Sektor.

Implementasi Renstra akan disinergikan dengan kebijakan perangkat daerah terkait. Sekolah dan instansi vertikal melalui forum koordinasi dan Musrenbang, guna memastikan keterpaduan pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah.

5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat.

Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang akan terus membuka ruang dialog, konsultasi publik, dan survei kepuasan masyarakat sebagai sarana partisipasi warga dalam evaluasi pelayanan publik. Pelibatan masyarakat diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan yang diberikan.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan keseluruhan substansi Renstra, dapat disimpulkan bahwa dokumen ini menjadi pedoman kebijakan dan operasional dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang selama periode 2025–2029. Keberhasilan implementasi Renstra sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan, penguatan kapasitas aparatur, sinkronisasi lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat.

Sejalan dengan itu, beberapa saran yang perlu diperhatikan adalah:

1. Menjadikan Renstra sebagai rujukan utama dalam penyusunan rencana kerja tahunan, penganggaran, dan pelaksanaan program;
2. Melaksanakan penguatan kapasitas SDM aparatur melalui pelatihan dan pemanfaatan teknologi informasi;
3. Mengoptimalkan pelibatan masyarakat melalui forum dialog publik, Konsultasi, dan survei kepuasan;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara periodik serta melakukan perbaikan berkelanjutan;
5. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dengan perangkat daerah, Sekolah, serta mitra pembangunan agar sinergi tercapai secara optimal.

Akhirnya. dokumen ini diharapkan dapat menjadi pijakan kerja yang kokoh dan adaptif, sekaligus memberikan arah yang jelas bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola Dinas Pendidikan yang responsif, inklusif, dan berdaya saing, serta mendukung pencapaian visi Sumedang Simpati Semakin Maju.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR